

I

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 21

ANALISIS DAN AREKSA

TAHUN 2008

Keharusan untuk Keluar dari Krisis Listrik

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Indonesia mendorong peningkatan konsumsi listrik dari waktu ke waktu. Namun, pertumbuhan konsumsi listrik tersebut sepertinya sulit sekali diimbangi oleh peningkatan kapasitas pasokan. Hal ini menjurus ke terjadinya krisis pasokan listrik, yang dalam jangka panjang akan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Oleh BRAMANIAN SURENDRO

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran sederhana mengenai perkembangan kondisi kelistrikan di Indonesia. Di antaranya adalah kapasitas terpasang, daya tersedia, dan beban puncak.

Kapasitas pembangkit terpasang menunjukkan daya maksimum yang mampu dihasilkan oleh pembangkit listrik. Data kapasitas terpasang sedikit banyak memberi gambaran mengenaiantisipasi jangka panjang pemerintah terhadap peningkatan kebutuhan listrik.

Sedangkan daya tersedia (PLN menyebutnya dengan daya mampu) menunjukkan realisasi daya yang dapat dihasilkan pembangkit listrik. Data daya tersedia dapat menjadi gambaran umum mengenai pencapaian operasional PLN dan operator pemasok energi listrik lainnya. Misalnya pertumbuhan kapasitas terpasang yang jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan daya tersedia dapat menjadi indikasi kuat adanya masalah di level operasional pembangkit.

Sementara itu, beban puncak (*peak demand*) menggambarkan maksimum daya yang digunakan atau dikonsumsi. Data ini meng-

gambaran perkembangan permintaan akan listrik yang terjadi di perekonomian kita.

Sayangnya, data terbaru yang dapat diperoleh mengenai informasi di atas umumnya hanya meliputi periode 2006 ke belakang. Namun, data yang ada setidaknya dapat menjadi gambaran kondisi yang terjadi sekarang.

Pembangunan infrastruktur listrik di Indonesia tampaknya terbengkalai setelah kita mema-

suki krisis perekonomian 1997-1998. Pada periode sebelum krisis, pertumbuhan kapasitas pembangkit terpasang mampu mencapai level yang relatif tinggi setiap tahun. Pada tahun 1997, pertumbuhan kapasitas terpasang bahkan mencapai 17,6 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut cenderung menurun pada periode setelah krisis sampai dengan tahun 2004.

Tren positif

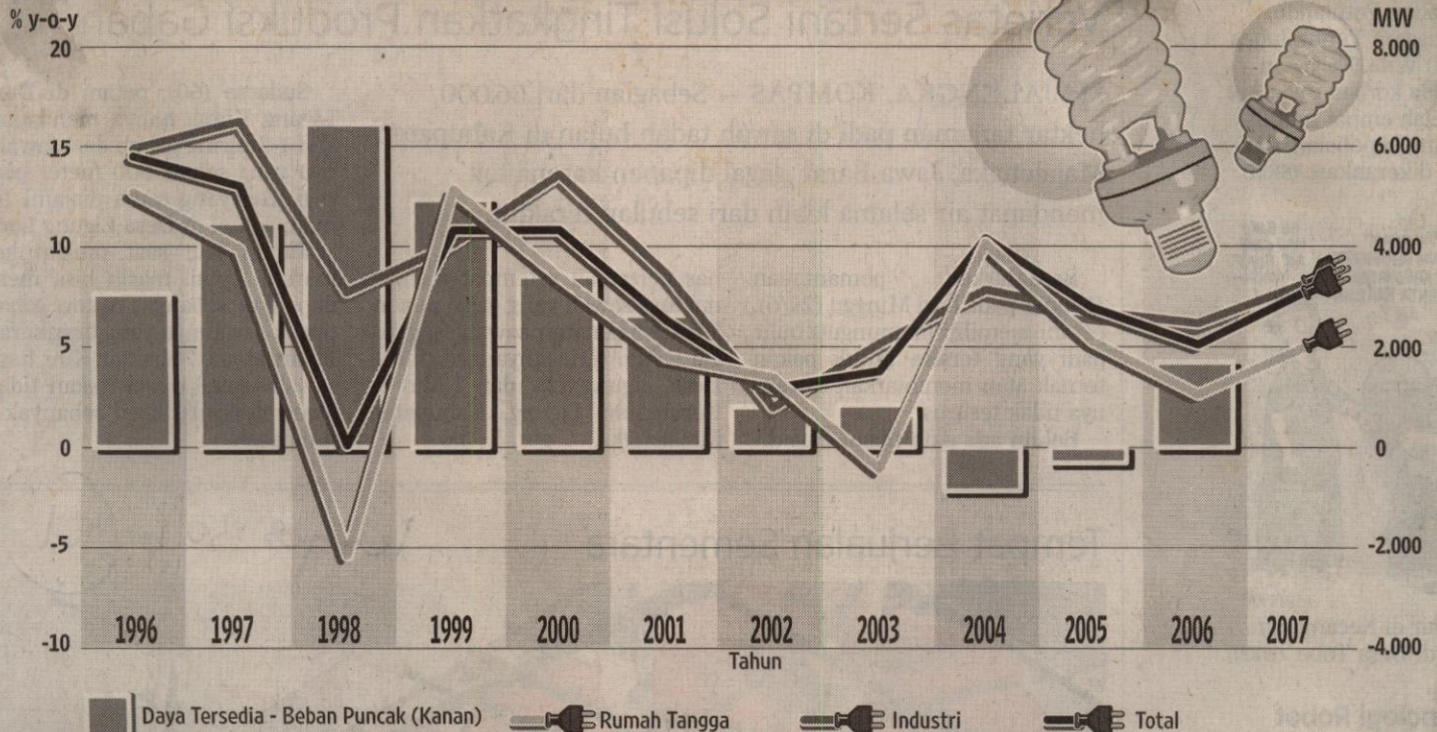
Pada tahun 2005 dan 2006, tingkat pertumbuhan kapasitas terpasang mulai bergerak dalam tren positif, bahkan mencapai 10,3 persen pada tahun 2006. Pascakrisis sampai dengan tahun 2006, rata-rata pertumbuhan kapasitas terpasang per tahun mencapai 2,4 persen per tahun (**Grafik**).

Pertumbuhan rata-rata beban puncak yang terjadi pada masa pasca-krisis ini jauh melampaui pertumbuhan daya yang tersedia.

Akibatnya, kondisi serupa berpengaruh terhadap pertumbuhan daya tersedia. Pasca krisis, pertumbuhan daya tersedia terus menunjukkan penurunan, dan beberapa kali mencatatkan pertumbuhan negatif, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2002, dan 2004. Padahal, dari daya yang

1

Pertumbuhan Konsumsi Listrik



Sumber: Danareksa

PUTRI

mampu dihasilkan pembangkit tersebut, sekitar 30 persen perlu dicadangkan dan masih ada beban persen lagi yang hilang (susut) di jaringan distribusi PLN.

Pada tahun 2005 dan 2006, pertumbuhan daya tersedia berbalik menjadi positif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2006, pertumbuhan bahkan tercatat sebesar 12,7 persen atau yang tertinggi setelah krisis. Namun, pascakrisis sampai dengan tahun 2006, rata-rata pertumbuhan daya tersedia hanya mencapai 1,8 persen per tahun.

Sisi permintaan

Sementara itu, pertumbuhan di sisi permintaan terlihat lebih kuat dari pertumbuhan di sisi suplai. Rata-rata pertumbuhan beban puncak (menggambarkan peningkatan konsumsi listrik) pascakrisis sampai dengan 2006 mencapai 5,9 persen. Pertumbuhan rata-rata beban puncak yang terjadi pada masa pasca-

krisis ini jauh melampaui pertumbuhan daya yang tersedia. Hal ini sebenarnya sudah menggambarkan prospek terjadinya krisis pasokan listrik.

Ancaman terjadinya krisis pasokan listrik terlihat dengan lebih jelas dari terus menurunnya selisih (*gap*) antara daya tersedia dan beban puncak pada tahun 1999-2004 (**Grafik**). Pada tahun 2004 selisih tersebut bahkan menjadi negatif, yang berarti terdapat defisit pasokan. Jadi, tidak mengherankan bahwa sejak tahun 2004 pemadaman listrik bergilir menjadi lebih marak, tidak hanya di kawasan permukiman, tetapi juga di kawasan industri (terutama industri kecil), tidak hanya di Jawa, tapi juga di beberapa daerah di luar Jawa.

Pada tahun 2005 ada pertumbuhan suplai listrik baru yang cukup signifikan. Oleh karena itu, pada tahun 2005 selisih antara daya tersedia dan beban puncak membaik meski masih

tercatat negatif.

Pada tahun 2006, keadaan ke-listrikan di Indonesia tampak lebih baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya selisih antara daya tersedia dan beban puncak secara signifikan pada tahun itu. Artinya, suplai listrik cukup berlebih. Memang, pada tahun itu kapasitas terpasang tumbuh cukup signifikan (**Grafik**).

Kenaikan harga BBM

Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa kondisi tersebut sebenarnya turut dipengaruhi oleh keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir tahun 2005. Kenaikan harga BBM kemudian diikuti oleh kenaikan BI *rate* (suku bunga patokan) ke level 12,75 persen yang membuat ekonomi melambat. Ekonomi baru mulai pulih memasuki paruh kedua tahun 2006.

Akibatnya, pertumbuhan konsumsi listrik pun mengalami penurunan cukup signifikan pada

2006 sehingga selisih antara daya tersedia dan beban puncak pun naik secara signifikan.

Pada tahun 2007 ekonomi Indonesia tumbuh dengan laju 6,3 persen, laju pertumbuhan tercepat setelah krisis. Meningkatnya aktivitas perekonomian ini tentunya diikuti pula oleh kenaikan konsumsi listrik yang cukup signifikan (**Grafik**).

Meskipun belum ada data terbaru mengenai neraca daya PLN, maraknya berita pemadaman bergilir yang ada di media massa belakangan ini dapat dijadikan indikator yang menunjukkan pertumbuhan suplai listrik kurang mampu memenuhi naiknya permintaan.

Belum tersedianya pembangkit listrik baru dengan pasokan daya yang cukup untuk memenuhi pertumbuhan permintaan menjadi masalah besar bagi kita. Setidaknya ini membuat ketersediaan pasokan menjadi sangat bergantung pada kinerja PLN (dan operator pembangkit lain)

di level operasional, sekaligus bergantung pada faktor-faktor luar yang dapat memengaruhi kinerja operasional PLN seperti faktor cuaca dan harga komoditas energi dunia.

Contoh nyatanya adalah terjadi pemutusan arus listrik bergilir karena pasokan bahan bakar terhambat akibat cuaca yang buruk di beberapa wilayah Indonesia. Pemutusan arus listrik secara bergilir juga harus terjadi karena adanya kerusakan teknis atau aktivitas pemeliharaan di instalasi pembangkit.

Mengganggu industri

Mengingat sektor rumah tangga dan sektor industri menjadi konsumen listrik terbesar (rata-rata menyumbang 38,9 persen dan 41 persen dari total konsumsi listrik setiap tahun), pemutusan arus listrik bergilir yang terjadi terus-menerus akan sangat mengganggu aktivitas masyarakat di kedua sektor ini.

Dampak jangka panjangnya, bila kondisi ini tidak diperbaiki, tentu berupa gagalnya Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi ideal yang sebenarnya mampu dicapai. Danareksa Research Institute memperkirakan bahwa elastisitas pertumbuhan konsumsi listrik adalah sebesar 1,25 persen untuk setiap 1 persen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Ini berarti, apabila ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen per tahun, permintaan listrik akan naik sekitar 7,5 persen.

Oleh karena itu, untuk melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai saat ini, mau tidak mau pemerintah perlu bekerja lebih keras dalam merealisasikan tersedianya pembangkit-pembangkit listrik baru. Konsentrasi barangkali juga harus dipecah untuk terus mencari investor-investor baru yang mau dan mampu memanfaatkan cadangan energi lain seperti gas dan sumber panas bumi yang potensi pemanfaatannya sangat besar di Indonesia.

BRAMANIAN SURENDRO
*Ekonom Danareksa
Research Institute*

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 16

PASOKAN LISTRIK

TAHUN 2008

PLN Mulai Membangun PLTU 400 MW di Langkat Sumut

MEDAN. Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan segera membangun dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang secara total memiliki kapasitas 400 Mega Watt (MW). Lokasi pembangkit terletak di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Proyek pembangkit listrik baru ini akan selesai pada pertengahan 2010.

Tambahan kapasitas pembangkit listrik jelas sangat mendesak mengingat listrik di Sumatra Utara selama ini masih sering *byar pet*. Pembangunan pembangkit baru tentu akan memperbaiki situasi.

Indra Priyadi, *General Mana-*

ger (GM) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut, Aceh dan Riau PLN mengatakan, dua pembangkit listrik baru itu masing-masing berkapasitas 200 MW. Dia berharap satu unit mesin pembangkit sudah bisa beroperasi sejak Agustus 2010. Sedangkan satu unit lainnya sudah bisa mulai beroperasi mulai November 2010. "Kami segera memulai pembangunan tahun ini juga," katanya.

Dia optimistis bisa segera memulai pembangunan proyek ini karena pembebasan lahan seluas 105 hektare untuk lokasi pembangkit itu sudah selesai. "Saat ini pelaksana proyek se-

dang melakukan pembersihan lahan termasuk untuk persiapan pembangunan akses jalan ke lokasi," kata Indra, seusai berte-

Gubernur berharap sedikit demi sedikit masalah krisis listrik di Sumut teratasi.

mu dan melaporkan rencana pembangunan itu kepada Gubernur Sumut Syamsul Arifin.

Robert, Staf Perencanaan PT

PLN Sumatra Utara, menambahkan sumber dana untuk mengongkosi pembangunan PLTU ini berasal dari konsorsium tiga perusahaan. Yakni kontraktor Chuan Dong dari China, PT Bagus Karya Jakarta, dan PT Nincék Bandung. Total nilai investasinya mencapai US\$ 270 juta.

Gubernur Sumut, Syamsul Arifin, berharap pembangunan PLTU itu bisa selesai tepat waktu, sehingga krisis listrik di Sumut bisa cepat teratasi. "Kalau krisis listrik tidak segera diatasi, saya khawatir akan bisa memperburuk situasi perekonomian masyarakat dan menjadi titik lemah bagi pertumbuhan inves-

tasi di Sumatra Utara," kata Syamsul Arifin.

Sebagai catatan, saat ini pasokan listrik ke Sumut Berasal dari delapan unit pembangkit. Suplai listrik terbesar berasal dari pembangkit listrik gas dan uap di Belawan yang terletak di Pulau Naga Putri Sicanang dengan kapasitas 1.077,9 MW.

Sedangkan pembangkit lainnya rata-rata berkapasitas kecil, sehingga setiap kali pembangkit di Belawan mengalami gangguan, maka pasokan listrik di seluruh Sumatra Utara juga akan padam.

Syamsul Ashar, Antara

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Industri Tuntut Kepastian

JAKARTA (SINDO)—Pelaku industri mempertanyakan kompensasi yang akan diberikan akibat pemadaman listrik bergilir.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat menilai, janji PLN memberikan kompensasi hanya taktik untuk mendinginkan situasi. Menurutnya, PLN tidak tegas menyebutkan kompensasi yang pantas diberikan pada industri, karena hanya akan diberikan secara berbeda-beda. "Ini aneh dan tidak serius," kata dia di Jakarta kemarin.

Seperti diberitakan, Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar mengatakan, kompensasi akan diberikan jika terjadi tiga kali pemadaman dalam satu hari, yakni maksimal lima jam dan terjadi tiga hari berturut-turut. "Kompensasinya adalah penguangan tagihan apabila PLN tidak bisa *deliver* pelayanan," katanya.

Seharusnya, kata Ade, PLN memberikan kompensasi yang lebih konkret, yakni mencabut kebijakan *dayamax*, ketimbang hanya mengurangi tagihan. Persoalannya, kebijakan *dayamax* dinilai sebagai kebijakan yang tidak adil. "Setiap tahun, industri TPT kehilangan 0,35% atau USD50 juta per tahun dari omzet USD15 miliar," katanya.

Pemerintah Siapkan Sanksi yang Lebih Keras

Dayamax, kata Ade, mulanya merupakan insentif bagi kalangan industri yang bersedia mengurangi konsumsi listrik PLN pada waktu beban puncak (WBP) antara pukul 17.00–22.00. Kompensasi yang diberikan, yaitu pelanggan diperbolehkan memakai daya kontrak yang dimanfaatkan pelanggan golongan P-3 pebisnis, industri, serta P-2 (kantor pemerintahan besar).

Namun, katanya, industri TPT selama ini justru dikenakan penalti apabila mereka tidak mampu mengoptimalkan

jatah listrik PLN sebanyak 350 jam per minggu. Padahal di tengah krisis listrik yang sedang berlangsung, seharusnya PLN bisa menghapus sejumlah kebijakan yang turut merugikan industri.

"Kebijakan Dayamax sama sekali tidak menyentuh rasa keadilan bagi industri. Masakalau pemakaian listrik kami di bawah 350 jam per minggu juga dikenakan denda, padahal defisit listrik itu sumbernya dari mereka juga," kata Ade.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan

Wanandi pesimistis PLN akan mampu memberikan kompensasi pada industri. Persoalannya, sekarang keuangan PLN sedang tertekan akibat harga minyak mentah dan batu bara. Di samping itu, PLN dianggap tidak transparan memberikan informasi kepada publik terkait dengan pengelolaan listrik di tubuh manajemen.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan memberikan sanksi lebih keras kepada konsumen yang menggunakan listrik secara berlebihan. Sanksi ini akan

dituangkan dalam sebuah aturan yang rencananya akan dikeluarkan pekan depan.

"Minggu depan kita keluaran aturan lebih keras siapa yang memakai listrik berlebihan, pakai AC berlebihan, mal berlebihan, lampu berlebihan, listrik berlebihan, kita akan ambil tindakan atau suruh bayar semahal-mahalnya," tandasnya saat membuka Rakornas I Badan Pengendali dan Pemenangan Pemilu Partai Golkar di Jakarta kemarin.

(agung kurniawan/
maya sofia)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Sanksi bagi Investor yang Seret Keuangan

PEMERINTAH punya beragam cara untuk menjamin pasokan listrik ke masyarakat tidak *ngadat*. Selain minta semua industri dan perusahaan penyedia listrik menyebutkan berapa kebutuhan batubara mereka tahun depan, pemerintah juga akan memberikan sanksi bagi perusahaan penyedia listrik swasta alias *Independent Power Producer* (IPP) yang tidak tepat waktu menyelesaikan *financial closing* pembangkit yang jadi bagian proyek 10.000 Megawatt.

Financial closing ialah satu tahapan dalam kontrak listrik swasta. Prosesnya, setelah penekanan kesepakatan pembelian listrik antara IPP dan PLN, IPP hanya punya waktu satu tahun untuk mencari pendana-

an. Begitu *financial closure* atau kepastian dana pembiayaan proyek sudah dapat dari bank atau obligasi, maka konstruksi bisa dilakukan.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyebut, urusan *financial closing* menjadi salah satu penyebab yang membuat proyek pembangunan pembangkit ada yang tersendat. "Setelah kami evaluasi, memang banyak sekali listrik swasta yang kami jadwalkan pada waktu tertentu untuk bisa berjalan, malah mundur. Salah satunya terjadi karena pada waktu *financial closing* mereka terlambat sehingga selesainya juga terlambat," kata Purnomo, Sabtu (28/6).

Menurut Purnomo, mundur-

nya *financial closing* terjadi karena beberapa hal. Antara lain, akibat bank tak percaya ke IPP yang minta pinjaman alias dinilai kurang bonafid. Atau bank minta surat jaminan pemerintah, agar bank mau memberi pinjaman. Padahal, pemerintah sangat hati-hati memberi surat jaminan itu.

"Aturan soal kepastian *financial closing* ini akan diperketat lagi," kata Purnomo, Ia akan meminta Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi bersama Direktur Utama PLN untuk mengevaluasi langkah apa yang terbaik apabila IPP mundur dari *financial closing*. "Apa diberi penalti atau diputus kontraknya. Saya harapkan dalam waktu dekat ini sudah ada rekomendasi," katanya.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI **JUN** JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 **30** 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2008

Baut Dicuri, Menara PLN Roboh, Rugi Rp 1,5 Miliar

PERUSAHAAN listrik negara dan pengguna setrum di wilayah Banten mengalami rugi besar karena sebab-pele. Salah satu menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (Sutet) di Pasir Karag, Koroncong, Pandeglang Banten roboh Jumat (27/6) lalu. Manajer PLN Unit Pelayanan Transmisi (UPT) Banten Slamet Ponidi mengatakan, menara penghantar listrik 70.000 volt roboh itu karena ada yang mencuri baut tiang dan besinya.

PT PLN mengklaim menderita kerugian hingga Rp 1,5 miliar. Sedangkan warga yang rugi karena listrik padam mencapai 258.000 pelanggan di Lebak dan Pandeglang.

Manajer PLN Areal Pelayanan Jaringan (APJ) Banten Setiabudi Suhud mengatakan Minggu (29/6) kemarin, pasokan listrik ke beberapa wilayah, seperti kota Rangkasbitung sekarang sudah beranjak normal karena PLN mengambil listrik dari jaringan transmisi Bogor. Sedangkan kota Pandeglang mendapat pasokan dari transmisi Serang. "Akibat tumbangya menara ini PLN mengalami kerugian hingga Rp 1,5 miliar," katanya.

Sementara untuk wilayah lainnya, pelanggan PLN harus rela untuk sementara tidak menikmati listrik. PLN memprioritaskan Rangkasbitung dan Serang karena ada pusat pemerintahan dan ada fasilitas kesehatan. Untuk perbaikan menara tersebut PLN perlu beberapa hari.

Untuk mencegah terjadinya pencurian yang mengakibatkan rusaknya jaringan distribusi PLN, maka ke depan PLN akan melibatkan warga sekitar untuk melakukan patroli keamanan.

Syamsul Ashar Antara

5

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2008

■ PEMADAMAN LISTRIK

Mari Kita Menagih Janji Kompensasi dari PLN

Gentur Putro Jati

JAKARTA. Bagi Anda yang kerap merasa rugi besar akibat listrik padam, sebaiknya perhatikan artikel ini. PT PLN (Perseero) akan mengganti kerugian pelanggan akibat pemadaman bergilir. Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menegaskan, kompensasi ke pelanggan bukan hanya buat industri saja, tapi juga pelanggan rumah tangga.

Namun, kata Fahmi, besarnya ganti rugi berbeda tiap daerah, tergantung karakteristik dan tingkat mutu pelayanan yang dijanjikan ke pelanggan di tiap wilayah. Bagaimana mekanisme pemberian ganti rugi itu? "Pelanggan mendapat kompensasi secara otomatis ke pembayaran

rekening bulan berikutnya," kata Fahmi, Sabtu (28/6) lalu.

Tentu, ada syaratnya. Yakni, jika PLN tak mampu memberi tingkat mutu pelayanan. Nah, mutu pelayanan ini antara lain menyangkut beberapa komponen pelayanan PLN yang dijanjikan kepada pelanggan.

Nantinya, PLN akan memberi kompensasi menurut lamanya pemadaman. Menurut Fahmi, masing-masing unit pelayanan PLN memiliki tabel pemadaman. Secara umum kompensasi diberikan jika di wilayah itu terjadi pemadaman tiga hari berturut-turut. Atau dalam sebulan ada tiga sampai empat kali pemadaman, masing-masing minimal tiga jam.

Jika ditelisik lebih jauh, sejatinya pemberian kompensasi ter-

sebut bukanlah hal baru. Pemerintah, melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 114/2002, pemerintah mewajibkan PLN memberi ganti rugi jika

Tapi, untuk pelanggan 900 watt, ganti ruginya Rp 2.000 saja.

terjadi pemadaman. Sayang, selama ini peraturan tersebut tak tersosialisasi dengan baik.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi membenarkan bahwa berdasarkan SK ter-

sebut pelanggan yang dirugikan pemadaman listrik akan mendapat kompensasi dari PLN.

"Namun konsumen hanya dapat kompensasi 10% dari biaya abonemen masing-masing golongan, bukan dari tagihan pemakaian," kata Tulus.

Menurut Tulus, jumlah kompensasi itu terlalu kecil dibanding kerugian konsumen. Karena untuk pelanggan 900 Watt saja, paling banter abonemennya Rp 20.000. "Nah 10%-nya kan cuma Rp 2.000, jadi ngga kelihatan," kata Tulus.

Harusnya, lanjut dia, pemerintah mengubah SK tersebut. Alasannya, tren pemadaman semakin meluas akibat krisis listrik yang tidak kunjung selesa-

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 27

TAHUN 2008

PEMADAMAN LISTRIK

Ikan-ikan Hias Pun Mati Kehabisan Oksigen...

Pemadaman listrik bergilir oleh Perusahaan Listrik Negara atau PLN secara rutin hampir setiap hari, pada tahun 2008 di Jakarta, merugikan banyak orang. Industri kecil merupakan korban pemadaman tersebut. Pedagang ikan hias, misalnya, harus rela kehilangan ikan yang mati lemas akibat kehabisan oksigen saat listrik padam. Pedagang ikan hias merugi Rp 200.000-Rp 300.000 per hari.

Adapun produsen mi dan roti merugi hingga 20 persen. Ini terjadi karena pedagang kelas menengah ke bawah umumnya tak punya genset pengganti listrik saat mati lampu.

Untuk menghindari diri dari kerugian lebih besar, pedagang ikan hias mencari cara untuk mempertahankan kehidupan ikan dagangan selama listrik mati. Caranya, menyibak-nyibakkan tangan ke dalam kolam untuk "membalik" air.

"Kalau capek, ya, berhenti, tetapi jangan terlalu lama, ikannya keburu kehabisan udara," ujar Kamil, pedagang ikan hias di belakang Pasar Ciledug, Kota Tangerang, Jumat (27/6). Ia

mengakui gerakan itu kurang efektif, tetapi cukup membantu ikan yang terancam mati lemas.

Kamil masih beruntung, upaya itu bisa menyelamatkan nyawa puluhan ikan hiasnya. Sementara itu, Hadi (26) dan Jaelani (40), pedagang ikan hias di Pasar Ikan Jalan Sumenep dan Jalan Kartini, Jakarta Pusat, merugi cukup besar saat PLN tiba-tiba mematikan aliran listrik ke kiosnya.

Menurut Hadi, pemadaman listrik pada Minggu (22/6) sekitar 2 jam membuat tiga ikan mas koi-nya mati. Ia rugi sekitar Rp 300.000. Tak hanya itu, kondisi tersebut menjadi promosi buruk bagi calon pembeli.

Bagi penjual yang tidak mempunyai genset, jalan terbaik untuk menyelamatkan ikan adalah memasukkannya ke plastik beroksigen. "Namun, tetap membuat calon pembeli urung membeli. Ikan dalam oksigen biasanya mudah lemas," katanya.

Sementara itu, Jaelani merugi hingga Rp 500.000 karena lima ekor ikan koi-nya mati akibat



KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAP

Tempat pembuatan mi di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (26/6), tidak dapat beroperasi akibat pemadaman listrik bergilir di Jakarta. Selain produksi mi menurun hingga 60 kilogram, kerugian yang dialami tempat pembuatan mi akibat pemadaman listrik pada hari itu mencapai Rp 4,2 juta.

tak mendapat pasokan oksigen yang cukup. Pompa air miliknya tak dapat beroperasi karena listrik padam. "Padahal saya rutin bayar listrik Rp 400.000-Rp 500.000 per bulan," katanya.

Aceng (29), pedagang ikan di Jalan Kartini, Jakpus, juga berpendapat sama. Ikan koi-nya banyak yang lemas karena kekurangan oksigen. Akibatnya, minat calon pembeli menurun.

"Beruntunglah pedagang yang punya genset. Pedagang kecil yang tidak punya genset seperti kami hanya bisa pasrah. Bulan lalu, dua hingga tiga ekor ikan berharga Rp 50.000 per ekor mati," katanya.

Pedagang mi dan roti

PLN biasanya memberi tahu jika akan melakukan pemadaman listrik, tetapi ada kalanya listrik tiba-tiba padam sehingga merugikan pedagang roti dan mi. Sakidjan (51), produsen mi di Petukangan Utara, Jakarta Selatan, kesal dengan pemadaman listrik pada Kamis (26/6) yang terjadi tiba-tiba tanpa pemberitahuan lebih dulu.

Kerugian akibat produksi mi yang terus menurun sejak tiga bulan lalu mencapai puncaknya.

Hasil produksi rata-rata 13 bal-15 bal per hari turun menjadi 10 bal-12 bal. "Sebenarnya bisa diantisipasi jika PLN memberi tahu sebelumnya," tutur Bendahara Paguyuban Mie Ayam Tunggal Rasa Se-Indonesia itu.

Defisit tiga bal setara dengan 90 kilogram mi. Satu kilogram mi bisa menjadi 10 porsi mi ayam. Dengan harga jual mi ayam Rp 7.000 per porsi, kerugian yang dicapai kali ini mencapai Rp 6,3 juta.

Pendapatan Rp 150.000 dari usaha minuman jus ikut lenyap karena blender tak bisa dipakai. "Jumlah itu cukup besar karena saya belum menaikkan harga jual dan harus menanggung gaji 40 karyawan," tutur pemilik warung mi ayam Kondang itu.

Kerugian juga menimpa Tohirun (44), produsen roti di Cipulir, Jaksel. Pemadaman listrik pada pukul 15.00-23.00 pada Senin (23/6) memperlambat proses produksi. Produksi rata-rata 6.000-7.000 roti per hari seharusnya selesai pukul 06.00, tetapi molor empat jam. Akibatnya, penjualan roti seharga Rp 600 per buah lewat warung-warung di Jabodetabek tak habis terjual.

"Biasanya saya mendapat

Rp 4,2 juta per hari, tetapi, saat listrik padam, jumlah itu berkurang Rp 750.000," ungkap Ketua Asosiasi Pedagang Bakery Indonesia Jaksel itu.

Sedia Genset

Jika pengusaha kecil kelimpungan karena pemadaman listrik, pedagang di mal tetap tenang. Pusat-pusat belanja di kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara, umpamanya, menyiagakan genset. Ini dilakukan oleh pengelola Pasar Pagi Mangga Dua, ITC Mangga Dua dan Mal Mangga Dua.

Pedagang di sana bahkan sering tak menyadari ada pemadaman listrik karena pengelola pusat belanja langsung menghidupkan genset.

"Paling padam hanya satu menit karena genset langsung hidup menggantikan listrik PLN," jelas Herry Mulyawan, Customer Relation PT Jakarta Sinar Intertrade (JSI) yang mengelola Mal Mangga Dua.

Lagi-lagi pengusaha kecil menjadi korban. Apalagi PLN hanya memberi kompensasi jika pemadaman terjadi selama tiga hari berturut-turut di suatu wilayah.... (CHE/RIZ/TRI)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

Semua Gedung Wajib Audit Energi

PLTU Cilacap beroperasi kembali.

JAKARTA — Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mewajibkan gedung-gedung melakukan audit energi untuk menghemat pemakaian listrik. "Audit ini akan dimulai dari gedung-gedung di Jakarta sebagai kota pelahap listrik terbesar," kata Menteri Energi Purnomo Yusgiantoro di Jakarta kemarin.

Purnomo menegaskan pemerintah telah membentuk tim konservasi energi yang bertugas mengevaluasi penggunaan energi di gedung-gedung pemerintah. Tim inilah yang akan melakukan audit. "Proyek uji cobanya adalah kantor-kantor sekitar Monas, Departemen Energi, PLN, dan Pemda DKI."

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Purwono berharap pihak swasta seperti mal dan gedung perkantoran melakukan audit energi secara mandiri. "Semua pasti berminat, karena penghematan energi berarti hemat biaya," tuturnya.

Gedung swasta, kata Purwono, bisa mengevaluasi pemakaian energi-

nya sendiri atau menyewa konsultan. Ia memastikan biaya yang dikeluarkan untuk audit akan kembali dalam waktu singkat. Peralnya, langkah ini berpotensi menghemat biaya listrik bulanan.

Menurut Purnomo, langkah penghematan energi ini mutlak diperlukan karena beban listrik se-Jawa-Bali semakin besar, sedangkan cadangan yang dimiliki hanya 20 persen. Apabila ada satu pembangkit dalam masa pemeliharaan, cadangan bisa turun di bawah 20 persen. Dampaknya adalah pemadaman bergilir.

Meningkatnya konsumsi listrik, kata dia, diperparah dengan beralihnya industri dari pemakaian mesin diesel ke listrik PLN. Biaya bahan bakar industri yang semakin tinggi menyebabkan biaya produksi industri meningkat. "Industri pun menakan biaya dengan beralih ke PLN."

Purnomo juga meminta PLN berkoordinasi dengan asosiasi industri dan Kamar Dagang dan Industri untuk sama-sama menghemat listrik. Langkah lainnya adalah menggunakan bahan bakar nabati pada pembangkit. Dalam jangka panjang, kata dia, pemerintah sudah menyiapkan

PLTU berkapasitas 10 ribu MW tahap kedua yang memanfaatkan panas bumi dan energi terbarukan lainnya.

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menambahkan PLN sudah meminta industri mengatur jadwal produksi. Dia melihat pada Sabtu dan Minggu beban listrik turun 1.000 MW. "Kami berunding supaya libur tidak serempak Sabtu-Minggu, tapi hari-hari lain," tuturnya. Asosiasi industri tekstil sudah menyatakan bersedia.

Fahmi menyampaikan kabar baik, hari ini PLTU Cilacap yang berkapasitas 600 MW mulai beroperasi bertahap dengan datangnya pasokan batu bara sebanyak 12 ribu ton. Pembangkit tersebut sempat tidak beroperasi sejak Selasa lalu, yang membuat Jawa-Bali kerap mengalami pemadaman bergilir.

Meski demikian, Fahmi mengingatkan sistem kelistrikan Jawa-Bali masih rawan. Pertumbuhan konsumsi listrik sejak Januari-Mei cukup tinggi, yaitu 6,8 persen. Akibatnya, konsumsi bahan bakar di pembangkit berbahan bakar minyak semakin besar. "Harus berhemat supaya subsidi tidak meningkat," kata dia. ● NIEKE INDIRIETTA

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI **JUN** JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 **30** 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2008

Potensi Besar Setrum Mikro Hidro di Kalsel

KALIMANTAN Selatan memiliki potensi listrik tenaga air yang lebih besar ketimbang sumber energi lain. Berdasarkan survei Perusahaan Listrik Negara (PLN), banyak lokasi potensial untuk pembangkit mikro hidro. Misalnya, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tepatnya di Loksado. Salah satu sungai di kecamatan tersebut berpotensi menggerakkan turbin pembangkit mikro hidro sehingga bisa menghasilkan daya listrik hingga 5 Mega Watt (MW).

Manajer Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Riam Kanan Kardoyo mengungkapkan, kendati cuma 5 MW, daya listrik sebanyak itu sudah cukup untuk menerangi seluruh wilayah di Hulu Sungai Selatan, sehingga tidak perlu listrik dari pembangkit lainnya.

Yang menjadi masalah adalah: ongkos untuk membangun PLTA cukup mahal, meskipun nantinya ongkos operasionalnya bisa lebih murah ketimbang pembangkit yang memakai energi batubara maupun gas. "Biaya operasional PLTA hanya sekitar Rp 60 per kwh, jauh lebih murah daripada biaya pembangkit jenis lainnya, yang bisa mencapai sekitar Rp 2.000 per kwh," katanya.

Tapi pembangkit yang memanfaatkan arus air ini punya kelemahan. Saat debit air turun di musim kemarau, daya yang dihasilkan juga turun. Tapi persoalan ini bisa diatasi asalkan alam di sekitar sungai tidak rusak. Hingga kini belum ada investor yang berminat untuk mengembangkan PLTA tersebut.

Syamsul Ashar, Antara

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T.3

TAHUN 2008

'Defisit listrik sulit diatasi hingga 2009'

Pengusaha tak puas dengan janji kompensasi PLN

Oleh YUSUF WALUYO JATI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Sejumlah pengusaha nasional menilai pemberian ganti rugi oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada sejumlah sektor industri manufaktur yang mengalami kerugian akibat pemadaman bergilir di sentra-sentra industri Jawa-Bali, tidak menyentuh akar masalah.

Kompensasi yang diutarakan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar pada akhir pekan lalu itu ditengarai merupakan upaya mengalihkan isu untuk meredakan gejolak di kalangan industri.

Kompensasi oleh PLN tersebut juga dianggap belum menyentuh rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan, terlebih defisit pasokan listrik ke sektor manufaktur masih berpotensi terulang lagi pada tahun depan.

"PLN tidak secara tegas menyebutkan kompensasi apa yang pantas bagi industri. Dia [Fahmi Mochtar] hanya mengatakan kompensasi yang diberikan akan berbeda-beda. Ini aneh dan tidak serius. Saya rasa PLN hanya berwacana dan hanya mau mendinginkan situasi," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Perindustrian Indonesia Ade Sudrajat, kemarin.

Pada Sabtu pekan lalu, Dirut PT PLN Fahmi Mochtar berjanji akan memberikan kompensasi kepada pelanggan industri dan rumah tangga jika masa pemadaman listrik PLN tidak sesuai dengan perjanjian awal.

PLN, kata dia, hanya akan memberikan kompensasi jika terjadi pemadaman tiga hari berturut-turut. "Kompensasinya adalah pengurangan tagihan," katanya.

Di tengah situasi yang merugikan industri, kata Ade, PLN harus segera memberikan kompensasi konkret, bukan hanya berupa pengurangan tagihan tetapi juga mencajut kebijakan Dayamax terhadap industri tekstil dan produk

tekstil (TPT) nasional.

"Kebijakan Dayamax yang masih berlaku sampai saat ini merupakan kebijakan *unfair business* yang dilakukan PLN. Setiap tahun, industri TPT kehilangan 0,35% atau US\$50 juta per tahun dari omzet US\$15 miliar," katanya.

Dayamax, kata Ade, awal mulanya merupakan insentif bagi kalangan industri yang bersedia mengurangi konsumsi listrik pada waktu beban puncak (WBP) antara pukul 17.00 - 22.00 di mana PLN akan memberikan kompensasi berupa hak untuk menggunakan listrik di luar WBP melebihi kontrak. Kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh pelanggan golongan B-3 (bisnis), industri, serta P-2 (pemerintahan besar).

Penalti

Namun, kata Ade, industri TPT selama ini justru dikenai penalti apabila tidak mampu mengoptimalkan jatah listrik PLN sebanyak 350 jam per minggu, padahal di tengah krisis listrik yang sedang berlangsung seharusnya PLN menghapus kebijakan yang berpotensi merugikan industri.

"Kebijakan Dayamax sama sekali tidak menyentuh rasa keadilan bagi industri. Mosok kalau pemakaian listrik kami di bawah 350 jam per minggu juga dikenakan denda? Padahal, defisit listrik itu sumbernya dari mereka juga," lanjutnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi pesimistis terhadap kompensasi yang dijanjikan dirut PLN tersebut, sebab *cashflow* BUMN tersebut juga sedang tidak cukup sehat. Apalagi, PLN dianggap tidak transparan memberikan informasi kepada publik terkait dengan pengelolaan listrik.

Dia bahkan memperkirakan defisit listrik nasional akan terus berlangsung hingga 2009 karena penyelesaian *crash program* pembangunan pembangkit 10.000 megawatt (MW) masih sulit direalisasikan. (yusuf.waluyo@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 27

TAHUN 2008

Tamu-tamu Hotel Batal Menginap

Kawasan Pantai Carita Masih Gelap

PANDEGLANG, KOMPAS – Hingga Minggu (29/6) malam, pasokan listrik untuk Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten, belum kembali normal. Kondisi itu membuat banyak tamu hotel di kawasan Pantai Carita batal menginap, dan warga perkotaan kesulitan mengakses air bersih.

Sejak jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) di Desa Pasir Karang, Kecamatan Koroncong, Pandeglang, tumbang pada Jumat lalu, beberapa hotel di kawasan Pantai Carita dan Labuan menggunakan generator listrik atau genset. Namun, sebagian besar hotel menggunakan lilin sebagai penerang karena tidak memiliki genset.

Salah satunya adalah pondok peristirahatan (*cottage*) di Pantai Karangari di kawasan Carita, Pandeglang. Karena belum memiliki genset, pengelola *cottage* terpaksa menggunakan lilin sebagai penerang selama tiga hari listrik padam.

Begitu pula sejumlah hotel atau tempat peristirahatan lain, seperti Carita Baka Baka dan Lipopo Carita. Lampu, pendingin ruangan, dan pompa air elektrik tidak dapat digunakan karena genset yang mereka miliki rusak.

Kondisi itu membuat banyak tamu hotel pulang ataupun mem-

batalkan pesanan kamar.

"Banyak yang batal menginap meski sudah pesan dan membayar uang muka. Sekarang *cottage* di sini kosong semua," tutur Tengku Abdurrahman, pengelola pantai dan *cottage* Karangari.

Para pengelola hotel mengeluh karena okupansi hotel menurun. Padahal, mereka sudah berharap tingkat hunian akan meningkat karena saat ini bertepatan dengan musim libur sekolah.

"Seharusnya saat-saat libur sekolah seperti ini, hotel-hotel panen raya. Tapi, kenyataannya, malah merugi karena listrik padam," ujar Tengku menambahkan.

Kesulitan air

Selain tempat wisata, dampak pemadaman listrik juga mulai dikeluhkan warga di sejumlah kompleks perumahan di Pandeglang. Pasalnya, warga kesulitan mendapatkan air karena pompa air elektrik milik mereka tidak dapat digunakan.

Oleh karena itu, sebagian warga terpaksa mengambil air di sungai atau sumber mata air lainnya. Di antaranya, warga Perumahan Bumi Pandeglang Indah di Desa Kaduhejo, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang.

Sebagian warga terpaksa mandi dan mencuci pakaian di kolam mata air di Kampung Kadu Buluh, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, yang berjarak sekitar 1 kilometer dari perumahan.

"Sudah tiga hari di rumah enggak ada air, listriknya mati. Makanya, pagi-pagi, (saya) berangkat mandi di kolam," kata Ny Agus, salah seorang warga Perumahan Bumi Pandeglang Indah.

Selain itu, puluhan warga juga terpaksa mengambil air dari kolam sumber mata air yang biasanya digunakan oleh warga kampung. Mereka membawa ember, jeriken, galon, serta botol untuk mengambil air kolam. Salah satunya adalah Encep, yang membawa tiga galon air mineral untuk mengambil air bersama anaknya.

Sementara itu, hingga kemarin, tower SUTT berkapasitas 70.000 volt yang tumbang belum juga selesai diperbaiki. Tower itu roboh akibat besi penyangganya dicuri orang. Guna mengamankan tower yang sudah roboh, sejumlah polisi, kemarin, tampak berjaga-jaga. (NTA)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

PLTO Kian Menjanjikan

LONDON (SINDO)—Triodos, sebuah bank yang berbasis di Belanda, memprediksi, pembangkit listrik tenaga ombak (PLTO) ke depan akan semakin menjanjikan.

Dalam wawancara eksklusif dengan Reuters belum lama ini, Direktur Triodos Matthew Clayton menyatakan, PLTO akan maju pesat dalam lima tahun mendatang. "Pangsa pasar ada di sana, pengembangan PLTO akan maju pesat," kata Direktur Triodos Matthew Clayton.

Triodos merupakan salah satu bank yang pertama kali membiayai pengembangan pembangkit listrik tenaga angin (PLTA) pada 1980-an. Bank ini sangat peduli terhadap pengembangan energi alternatif sejak tragedi Chernobyl pada 1986.

Menurut Clayton, pihaknya telah menginvestasikan modalnya untuk pengembangan PLTO sebesar USD16,6 miliar. Angka ini naik 20% dibanding modal yang akan diberikan untuk pengembangan PLTA. "Dari rencana bisnis dan teknologi yang telah kami amati, akan ada pengembangan dari sektor maritim yang cukup signifikan.

Saya kira PLTO hanya ketinggalan lima tahun dibanding PLTA," imbuhnya.

Clayton mencontohkan, di Inggris, saat ini PLTA mampu menyumbangkan tenaga listrik sebesar 24 megawatt (MW). Dalam dua tahun mendatang, kata Clayton, akan ada sekitar 30 peluang investasi PLTO. Menurut Clayton, saat ini Triodos telah menginvestasikan 1,8 juta pounds di bidang Marine Current Turbines—sebuah peralatan yang berfungsi seperti turbin di PLTA.

Clayton menjelaskan, di tengah semakin tingginya harga minyak dunia, harga listrik juga mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini mendorong para pemimpin dunia mengembangkan energi alternatif yang murah dan ramah lingkungan. Dalam hal ini, PLTO menjadi salah satu solusi yang dapat diandalkan.

Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)

yang kini marak dibicarakan, PLTO memiliki berbagai keunggulan. Selain murah dan ramah lingkungan, energi listrik yang dihasilkan mampu mencukupi kebutuhan listrik ribuan rumah tangga.

Andrew Parish, Direktur Eksekutif Wavebob, perusahaan yang membangun prototipe pembangkit listrik gelombang laut di perairan barat Irlandia, menyatakan bahwa PLTO yang dipimpinnya saat ini mampu melistriki 1.000 rumah. "Ini merupakan langkah jauh ke depan bagi produksi energi terbarukan di Irlandia," ujarnya.

Sistem pembangkit listrik PLTO terdiri atas *chamber* berisi udara yang berfungsi sebagai penggerak turbin, kolom tempat air bergerak naik-turun melalui saluran yang terhubung dengan generator. Gerakan air naik dan turun seiring gelombang laut menyebabkan mengalirnya udara melalui saluran menuju turbin.

Turbin tersebut didesain untuk bisa bekerja dengan generator putaran dua arah. Sistem yang berfungsi mengonversi energi mekanik menjadi listrik terletak di atas

KONVERSI ENERGI GELOMBANG LUAT PELAMIS

Satu dari beberapa sistem yang menggunakan pergerakan gelombang air laut untuk membangkitkan energi listrik

Pelamis adalah alat setengah tenggelam, berbentuk silinder yang dihubungkan dengan engsel hidraulik.



permukaan laut dan terisolasi dari air laut dengan meletakkannya di dalam ruang khusus kedap air sehingga bisa dipastikan tidak bersentuhan dengan air laut.

Dengan sistem yang dimilikinya, pembangkit listrik tersebut bisa memanfaatkan efisiensi optimal dari energi gelombang dengan meminimalisasi gelombang-gelombang yang ekstrem. Efisiensi optimal bisa didapat ketika gelombang dalam kondisi normal.

Selain Irlandia, negara lain yang telah mengembangkan PLTO adalah Portugal. Proyek ini ditangani oleh Pelamis. Lisbon sangat peduli terhadap energi alternatif ramah lingkungan. Portugal bahkan tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga sinar matahari terbesar di dunia. Proyek senilai lebih dari 60 juta euro itu diharapkan mampu mengurangi emisi sekitar 30.000 ton penyebab pemanasan global.

(Rtr/AFP/BBC/imagem)



ISTIMEWA

ENERGI LISTRIK

Sebuah konversi energi listrik Pelamis saat menjalani tes akhir di Pelabuhan Peniche, Portugal. Negara ini berupaya keras mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listriknya.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

PLN Rombak Bisnis Listrik Swasta

JAKARTA- PT PLN segera mengevaluasi ulang model kerja sama dengan pemasok listrik dari pembangkit listrik swasta (*independent power producer/IPP*). Kemampuan finansial pemasok listrik dari pembangkit swasta akan dilihat sebagai poin utama. Rencana pengkajian ulang model bisnis dengan IPP ini merupakan tindakan menghadapi banyaknya pemasok listrik swasta yang bermasalah dari aspek keuangan.

"Kami akan dahulukan kepentingan pasokan ke masyarakat dengan mendahulukan kemampuan keuangan IPP," ujar Wakil Dirut PLN Rudiantara kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (28/6). Hadir pada pertemuan tersebut Dirut PLN Fahmi Mochtar dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.

Saat ini terdapat 150 perusahaan swasta yang memasok listrik ke PLN. Dari jumlah itu, cuma 50 IPP yang beroperasi. Sisanya, sebanyak sembilan IPP dalam tahap pembangunan, dan sekitar 15-20 IPP dalam tahap *financial closing*. "Yang lainnya masih belum apa-apa," jelas dia.

Purnomo Yusgiantoro menyoroti dua aspek yang

menjadi masalah IPP di Tanah Air. Dari segi keuangan, banyak IPP yang masih tersendat karena persoalan *financial closing* atau kendala pembayaran bahan bakar seperti yang terjadi di PLTU Cilacap.

Persoalan berikutnya adalah operasional. Purnomo mencontohkan, masalah pasokan batubara yang merupakan bahan bakar yang sangat vital untuk keberlangsungan pembangkit. "Ini sebetulnya persoalan B to B (*business to business*). Karena sudah mengganggu, pemerintah akhirnya turun tangan," katanya.

Dirut PLN Fahmi Mochtar mengakui, pasokan bahan bakar bagi pembangkit, termasuk batubara, menjadi persoalan serius. Karena itu, PLN kemungkinan mengajukan revisi alokasi bahan bakar seiring pertumbuhan konsumsi listrik yang cukup besar namun tidak didukung dengan tambahan pasokan yang signifikan.

Dalam APBN-P 2008, kuota BBM PLN mencapai 8,9 juta kl. Namun, Fahmi memperkirakan kuota ini akan terlampaui. PLN memperkirakan konsumsi BBM pembangkit tahun ini mencapai 10,06 juta kl. (pya)

B

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN FEB MAR APR MEI <u>JUN</u> JUL AGST SEPT OKT NOV DES											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 <u>28</u> 29 30 31											
HALAMAN: 16										TAHUN 2008	

Pemadaman Listrik Bergilir di Kalsel Lebih Setahun

Banjarmasin - Penolakan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap permintaan PT PLN Wilayah Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah untuk dapat menganggarkan biaya sewa mesin pengganti kapasitas 40 megawatt (MW) sebesar Rp 40 miliar, menjadikan pemadaman bergilir bisa lebih dari setahun ke depan.

Informasi yang dihimpun, Sabtu (28/6), PT PLN Kalsel-Kalteng tidak bisa berbuat banyak karena telah menyiapkan anggaran Rp 150 miliar untuk operasional mesin sewa guna mengantisipasi pemadaman selama masa kritis listrik di Kalsel-Kalteng periode Agustus 2008 sampai dengan Maret 2010. Permintaan anggaran sewa mesin juga disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk sewa mesin baru kapasitas 20 MW dengan biaya sewa Rp 20 miliar, guna menghindari pemadaman bergilir selama periode Agustus 2008 - Maret 2010.

Manajer Pembangkit PT PLN Wilayah Kalsel-Kalteng, Dwi Priyo Basuki, mengatakan pemadaman bergilir sampai dengan terbangunnya mesin pembangkit PLTU Asam-Asam unit tiga dan empat pada tahun 2010. "Bila kita tidak mendapatkan mesin sewa dari anggaran Pemda maka pemadaman bergilir tidak bisa dihindari hingga lebih dari satu tahun ke depan," ucapnya.

Saat ini defisit daya di Kalsel dan Kalteng mencapai 96,4 MW dari beban puncak mencapai 284,4 MW, sedangkan daya mampu yang dimiliki PLN hanya 188 MW. Defisit daya tersebut akan berkurang setelah masuknya genset dengan kapasitas 2x30 MW yang rencananya akan masuk ke sistem PLN Kalsel dan Kalteng pada awal April 2009. (ant/ayu)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2008

Investor Tiongkok Bangun PLTU di NTT

[KUPANG] Seluruh mesin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang akan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menggunakan mesin buatan Tiongkok karena tender pengadaannya dimenangkan investor Tiongkok. Demikian General Manager PT PLN Wilayah NTT, Amir Rosidin kepada SP, di Kupang, Sabtu (28/6) pagi.

Dijelaskan, saat ini sedang dilaksanakan pembangunan PLTU di Ropa, utara Kabupaten Ende dengan kapasitas 2 x 7 megawatt (MW). Sementara itu, dipastikan pembangunan PLTU 2 x 15 MW di Bolok (Kupang) dan 4 x 6 MW di Atambua (Kabupaten Belu) yang berbatasan dengan Timor Leste. Sehingga, kebutuhan pelayanan listrik bagi masyarakat dapat terpenuhi.

Ia mengakui, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTT, PLN mengoperasikan 415 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), melayani 204.620 pelanggan dengan daya terpasang 105,28 MW. Terdiri dari 140.862 pelanggan rumah tangga (66 persen),

31.332 pelanggan bisnis (16 persen), 8.472 pelanggan industri (4 persen), dan sisanya 26.100 pelanggan sosial, pemerintah dan lainnya (14 persen).

Menurut Amir, saat ini rasio elektrifikasi masih 25 persen. Di mana, 16 wilayah kecamatan yang belum tersentuh pelayanan listrik karena kondisi geografis wilayah yang terdiri atas 566 buah pulau kecil dan besar. Kondisi inilah yang cukup menyulitkan PLN untuk melakukan pengembangan, terutama membangun PLTD baru.

Dijelaskan, seluruh mesin pembangkit yang ada saat ini sudah berusia rata-rata di atas 15 tahun. Sehingga, diperlukan adanya penambahan pembangkit baru agar dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Sedangkan, untuk kestabilan pelayanan listrik akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), secara bertahap dilakukan konversi BBM dari jenis *High Speed Diesel (HSD)* ke jenis *Marine Fluid Oil (MFO)* yang harganya jauh lebih murah.

Selain itu, lanjutnya, pihak-

nya akan terus mendorong realisasi pembangunan sejumlah PLTU yang sudah diprogramkan, termasuk pembangunan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu berkapasitas 2 x 2,5 MW serta pengoperasian PLTP Mataloko yang berkapasitas 2,5 MW. Selain itu, segera dibangun pula Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berkapasitas 2 MW di Kapan, Timor Tengah Selatan.

Selektif

Ia menambahkan, pihaknya tidak menutup penyambungan bagi pelanggan baru, meskipun terdapat kekurangan daya. Penyambungan dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kepada calon pelanggan yang masih tercatat dalam daftar tunggu, diharapkan dapat bersabar hingga dapat terlayani setelah penambahan pembangkit baru tersebut.

PLN segera bersurat ke sejumlah sekolah teknik (kejuruan) di daerah pembangunan PLTU, agar menyiapkan 10 siswa terbaik untuk diseleksi

dan diberikan pelatihan di sejumlah PLTU yang sudah beroperasi di dalam negeri.

Para siswa terbaik tersebut, selanjutnya akan dipekerjakan sementara (magang) di PLTU di Tiongkok dalam rangka transfer teknologi. Mereka juga akan dilibatkan pada saat pemasangan instalasi PLTU serta pengetesan mesin. Sehingga diharapkan, mereka dapat mengatasi gangguan ketika PLTU mulai beroperasi secara maksimal.

Sementara itu, PT PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara (Sumut), Aceh, dan Riau (Pikitring Suar) akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumut berkekuatan 400 MW di daerah Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumut.

"Pembangunan PLTU ini dimaksudkan untuk mengatasi sebagian kekurangan pasokan listrik di Sumut yang selama ini menjadi sorotan masyarakat. Kedua unit mesin pembangkit yang akan dibangun ini masing-masing berkapasitas 200 MW. Mesin pem-

bangkit unit satu diharapkan siap dan berproduksi Agustus 2010, sedangkan unit dua akan beroperasi November 2010," kata General Manager PT PLN Pikitring Suar, Indra Pribadi se usai menemui Gubernur Sumut H Syamsul Arifin, di Medan, Jumat (27/6).

Mesin pembangkit PLTU tersebut akan dibangun oleh 3 konsorsium yakni kontraktor Chuan Dong dari Tiongkok, PT Bagus Karya Jakarta dan PT Nincek Bandung dengan nilai kontrak sebesar US\$ 270 juta.

Saat ini dikatakan tanah untuk lokasi pembangunannya sudah tersedia dan sudah selesai pembebasan yakni seluas 105 ha, dan saat ini sedang dilakukan *land clearing*, termasuk pembangunan akses jalan ke lokasi.

"Dalam proses pembangunannya pihak kontraktor melibatkan tenaga kerja lokal sebagai upaya memberdayakan tenaga kerja yang ada di daerah ini, sekaligus membuktikan bahwa pembangunan ini mampu membuka lapangan pekerjaan bagi daerah Sumut," katanya. [120/151]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2008

PLN Minta Industri Gilir Hari Libur

JAKARTA (MI): Krisis kelistrikan akibat defisit daya makin serius. Perusahaan Listrik Negara (PLN) pun meminta kalangan industri menggilir hari libur untuk menghemat pemakaian listrik.

Direktur Utama PT PLN (persero) Fahmi Mochtar mengemukakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan industri untuk menggilir hari libur itu.

"Selama ini industri kan liburinya selalu Sabtu-Minggu. Kami minta industri libur bergantian agar pemakaian listrik tidak melebihi beban," kata Fahmi di Jakarta, Sabtu (28/6).

Saat industri libur, beban listrik bisa turun hingga 1.000 megawatt (Mw). Jika beban itu dibagi ke hari-hari lain, lanjut Fahmi, akan sangat membantu menurunkan beban puncak PLN.

Data PLN pada 2006 menunjukkan industri menyerap 38,7% listrik dari PLN. Itu belum termasuk penggunaan listrik oleh usaha dan bisnis menengah dan kecil yang mencapai 15,4%. Adapun kelompok rumah tangga menyerap 38,9% listrik dan sisanya 7,1% diserap kalangan umum lainnya.

Krisis listrik diperkirakan terus terjadi tahun ini karena cadangan listrik yang tersedia hanya 20%. Padahal, target cadangan listrik ditetapkan sebesar 30%.

Akibatnya, pemutusan arus listrik secara bergilir pun terjadi. Di sistem kelistrikan Jawa-Bali, pemadaman bergilir akibat defisit terjadi sejak 17 Juni 2008.

Defisit listrik terjadi karena sejumlah gangguan beruntun, antara lain adanya kerusakan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya dan PLTU Paiton. Defisit bertambah parah dengan berhenti beroperasinya PLTU Cilacap pada 21 Juni lalu karena tidak sanggup membeli batu bara.

Mulai kemarin, PLTU Cilacap beroperasi secara bertahap setelah pasokan batu bara sebanyak 12 ribu ton datang. Namun, pembangkit belum langsung beroperasi penuh. "Secara bertahap, daya akan di-

perbesar sampai kapasitas maksimal," jelas Fahmi.

Sebaliknya, sebanyak 7.900 pelanggan listrik di Jawa Barat dan Banten akan terus terkena pemadaman bergilir hingga awal 2010 karena pasokan listrik dari PLTA Saguling dan Cirata terus turun hingga 30%.

"Begitu juga PLTU tidak bisa optimal memproduksi listrik karena berkurangnya pasokan BBM," ujar Humas PT PLN Jabar dan Banten Adang Zarkasih.

Audit listrik

Selain meminta kalangan industri menggilir hari libur, pemerintah akan mengaudit penggunaan listrik di kantor-kantor pemerintahan mulai besok. Untuk proyek percontohan, pemerintah akan mengaudit kantor yang berada di sekitar Monas.

"Pilot project di Jakarta, yaitu kantor-kantor pemerintahan di sekitar Monas. Berlanjut ke Departemen ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kantor PLN, dan Kantor Pemprov DKI," jelas Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Sabtu (28/6).

Menurut Purnomo, audit dilakukan untuk mendorong konsumen menghemat pemakaian listrik guna mengurangi beban.

Audit listrik akan melihat dan menghitung pemakaian listrik oleh kantor-kantor tersebut. Jika dari hasil audit pemakaian listrik kantor itu berlebihan, pemerintah akan mengeluarkan lagi langkah-langkah penghematan guna menurunkan beban listrik di kantor-kantor tersebut. Audit akan terus dilakukan, sampai program penghematan berjalan baik.

"Jika Jakarta berhasil mengurangi penggunaan listriknya, kita bisa berhemat 30%. Tapi, tentu saja ini bertahap," jelasnya.

(Pia/EM/IK/LD/DY/X-11)

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

TAHUN 2008

Listrik di Pulau Untung Jawa Padam sejak Rabu

LISTRİK di Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu, padam sejak Rabu (25/6). Lurah Pulau Untung Jawa, Eko Suroyo, mengatakan listrik di pulau itu mulai padam pada Rabu (25/6) sekitar pukul 10.00 WIB. Penyebabnya kabel listrik yang ditanam di bawah laut rusak. "Sudah dilakukan pengecekan. Diperkirakan perbaikan akan selesai dalam dua minggu," Menurut Eko, pihaknya sudah mengantisipasi dengan memakai genset. Namun, belum dapat mengatasi permasalahan. Penduduk Pulau Untung Jawa yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan menghadapi persoalan kekurangan pasokan es. Para nelayan membutuhkan es untuk mengawetkan hasil tangkapan mereka agar tidak membusuk. Saat ini sebagian nelayan terpaksa membeli es dari daratan Jakarta. (Mhk/J-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 13 TAHUN 2008	

KOLOM PROBIS

PLN Harus Pahami Pengorbanan Industri

Oleh: Ade Sudrajat
Wakil Ketua Asosiasi Pertektilan Indonesia (API)

UNTUK mengatasi pemadaman listrik di Jawa bali, semua elemen masyarakat harus bergerak. Dari pengusaha tekstil sepakat mengorbankan satu hari kerja untuk tidak beroperasi dalam sebulan terkait dengan semakin menurunnya pasokan listrik PLN. Untuk menyasati hal itu kami dari kalangan industri bersedia mengurangi hari operasi kerja menjadi 29 hari dalam sebulan.

Konsekuensinya, memang sangat besar karena selain kerugian materi juga berpotensi merugikan secara non-materi. Apalagi juga sebagian besar anggota kami jadi konsumen primer PLN. Ini memang pengorbanan yang sangat besar. API sepenuhnya menyadari krisis energi yang saat ini tengah terjadi dan salah satunya dialami PLN sebagai pemasok listrik tunggal di Tanah Air.

Krisis energi tersebut sebenarnya bisa diprediksikan sejak tiga tahun silam. Misalnya di Jawa Barat saja pertumbuhan kebutuhan akan listrik sebesar enam persen per tahun. Padahal pertumbuhan pembangkit hanya sebesar satu persen per tahun. Otomatis itu akan tersedot, belum lagi dipicu kenaikan BBM pada 2005 dan 2008.

Contoh lain, orang yang semula menggunakan minyak tanah akibat kenaikan BBM akan kembali mengkalkulasikan dan memutuskan untuk menggunakan kompor listrik yang terbukti lebih efisien. Akibatnya, banyak orang beralih menggunakan kompor listrik menyebabkan konsumsi listrik tumbuh hingga lebih dari 10 persen per tahun. Akhirnya tidak seimbang, maka terjadilah kelangkaan listrik ini.

Sementara rencana pemerintah untuk mempercepat program pembangunan listrik 10 ribu mega watt (MW) baru akan terealisasi pada pertengahan 2009. Berarti selama menunggu tarif akan naik terus. Dan, hingga akhir pekan lalu belum ada solusi adanya pemadaman listrik nasional.

Sebenarnya meski produknya laku 100 persen, PLN tetap tidak sehat karena biaya produksi dan harga jual produknya tidak cocok. Misalnya biaya produksi Rp 1.200 dijual Rp 600. Lucunya kendati ada subsidi tetap tidak mencukupi. Efisiensinya sangat minim. ***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 18

TAHUN 2008

Harga Batu Bara Diatur

PLN Buat Perjanjian Pembelian Sesuai dengan APBN

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah akan menetapkan aturan baru soal harga jual batu bara. Harga batu bara untuk pasar domestik tidak boleh lebih tinggi dari harga terendah batu bara ekspor. Ini merupakan salah satu kebijakan jangka pendek yang diambil pemerintah untuk meningkatkan jaminan pasokan batu bara ke PLN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Sabtu (28/6) di Jakarta, mengemukakan, aturan itu segera dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri tentang kebijakan harga batu bara untuk kewajiban memasok ke dalam negeri.

"Sebenarnya kita sudah punya

kebijakan memasok batu bara ke dalam negeri, tapi PLN kesulitan menetapkan harga karena tidak punya patokan harga batu bara di pasar," jelas Purnomo.

Sekitar 30 persen dari total produksi batu bara digunakan ke domestik. Total produksi batu bara tahun lalu mencapai 215 juta

ton, sekitar 34 juta ton di antaranya dipasok untuk kebutuhan pembangkit listrik milik PLN ataupun swasta.

PLN hanya dapat bocoran

Suplai batu bara ke PLN sebagian besar berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan sebagian dari perusahaan pemegang kuasa pertambangan.

PLN membuat perjanjian pembelian batu bara setiap tahun untuk menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral

Batu Bara dan Panas Bumi M Marpaung mengatakan, kendala aturan memasok ke dalam negeri telah ada di Pasal 12 kontrak dengan PKP2B, kewajiban itu kerap tak dilakukan dengan benar.

Mengenai harga batu bara, Wakil Dirut PT PLN Rudiantar mengatakan, "Selama ini kita buta, ya, paling dapat bocoran sedikit dari pemerintah berapa harga sebenarnya yang wajar."

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, pemerintah akan mengurangi kenyamanan masyarakat dalam pemakaian listrik. Ini dilakukan agar pemadaman listrik tidak terlalu meluas. (DOT/INU)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

SISI LAIN

Sudah Tarif Naik, Listrik Malah Bikin Rusak Barang

Zaman katanya makin modern, tetapi listrik—sebagai penanda zaman modern—malah tambah kacau. Sudah tarifnya makin mahal, malah membikin rusak barang-barang elektronik. Itulah yang kini menjadi gerutuan warga, konsumen PLN sejak tarif listrik naik dan pemadaman bergilir diberlakukan.

"Tarif listrik naik, kita bayar sekarang tambah mahal, tetapi PLN malah bikin rusak barang-barang kita. Kita jadi keluar uang lagi buat servis," keluh Mulyadi (36), warga di RT 05 RW 09, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (28/6).

Mulyadi pantas saja kesal, Kamis (26/6) lalu sekitar pukul 09.00, dia dan para tetangganya mendapat kejutan pahit. Barang-barang elektronik di rumah mereka tiba-tiba mengeluarkan suara nyaris seperti ledakan dan bohlam-bohlam lampu meledak. Untungnya pecahan bohlam itu tidak sampai melukai penghuni rumah.

Tak cuma bohlam, televisi, kipas angin, sampai kulkas ikut semapat diterjang daya listrik PLN yang tiba-tiba tak stabil. Padahal, sehari sebelumnya, Rabu (25/6), kampung itu terkena pemadaman bergilir sejak pukul 08.00 hingga 03.00.

"Paginya, lampu tiba-tiba redup, terus terang, terus kayak tegang gitu, setelah itu tiba-tiba meledak pecah. Barang elektronik lain juga langsung rusak," ujar Mulyadi.

Mulyadi masih belum tahu berapa ongkos yang harus dibayar untuk menyervis barang-barang elektroniknya yang rusak itu karena servisnya belum selesai. Untuk sementara, keluarganya harus absen nonton televisi dan berkipas pakai koran untuk mengusir udara panas di rumah.



JITET

Ikan jutaan rupiah mati

Gerutuan juga terlontar dari para pedagang ikan hias dan bunga Barito yang kini berjualan di Jalan Margaguna, Jakarta Selatan. Seperti halnya warga di Kebon Jeruk tadi, para pedagang ikan itu tidak mendapat pemberitahuan dari PLN soal jadwal pemadaman listrik bergilir. Akibatnya, ikan-ikan dagangan mereka menjadi korban. Ikan-ikan itu mati kekurangan oksigen.

Ikan yang mati itu di antaranya dua ekor pari jualan milik Ari Tri Putranto (38). Pemadaman yang terjadi pekan lalu selama sekitar lima jam itu membuat mesin oksigen mati. Akibat tak ada pemberitahuan PLN, para pedagang tidak sempat mengevakuasi ikan-ikan mereka ke dalam kantong-kantong plastik beroksigen. Ikan-ikan itu akhirnya terpaksa bertahan di akuarium mereka.

Ikan pari milik Ari merupakan ikan pari air tawar asal Amazon, Amerika Selatan. Ikan pari seharga Rp 3 juta per ekor itu akhirnya mati kekurangan oksigen. "Padahal, saat ini kita sedang butuh banyak biaya buat biaya sekolah tahun ajaran baru. Daftar ulang dan buku di SD saja sampai Rp 2,5 juta," keluh Ari.

Nah, PLN, bagaimana ini? (SARIE FEBRIANE)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : A

TAHUN 2008

Dua Kabupaten di Banten Gelap Gulita

Menara SUTT Roboh, Besi Penyangga Dicuri

PANDEGLANG, KOMPAS — Menara jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT di Desa Pasir Karang, Kecamatan Koroncong, Pandeglang, Banten, roboh karena besi penyangganya hilang dicuri. Akibatnya, sudah dua hari ini aliran listrik di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak padam.

Menara SUTT dengan kapasitas daya 70.000 volt di Desa Pasir Karang tumbang pada Jumat sore lalu. Diduga, menara itu tumbang lantaran besi penyangga di bagian tengah menara hilang dicuri orang.

Kondisi itu mengakibatkan distribusi listrik ke tiga gardu induk (GI), yakni GI Rangkasbitung, GI Saketi, dan GI Menes, terhenti sehingga sejak Jumat malam, aliran listrik di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang padam.

Bahkan, hingga Sabtu (28/6) kemarin, aliran listrik di sekitar 32 kecamatan di Pandeglang masih padam. Hanya daerah di sepanjang jalan protokol di sekitar pusat kota yang masih teraliri listrik, sementara seluruh kecamatan di daerah selatan Pandeglang, dari Kecamatan Kaduhejo di perbatasan kota, Cimanuk, Saketi, hingga Panimbang, Sumur, Cimanggu, Cibaliung, di dekat Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, sama sekali tidak teraliri listrik.

Dampak robohnya menara SUTT di daerah perbatasan Pandeglang, Serang, dan Lebak itu juga dirasakan ratusan ribu warga



Indikasinya mengarah ke pencurian. Kami sudah melihat ke lokasi dan memintai keterangan sejumlah saksi.

Yusuf Rahmanto

Lebak. Hanya sebagian daerah di sekitar kota Rangkasbitung, Malingping, dan Bayah yang masih teraliri listrik.

"Daerah pusat-pusat pemerintahan dan layanan publik di Pandeglang memang kami beri pasokan listrik dari Serang, sedangkan untuk Rangkasbitung dipasok dari Kopo (Serang), dan sebagian dari Sukabumi," kata Agus Suherman, Manajer Distribusi PT PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Banten, Sabtu kemarin.

Terganggu

Padamnya aliran listrik dua hari terakhir mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Sedikitnya 258.000 rumah di dua kabupaten itu gelap gulita, tanpa penerang-

an. Para guru dan pemilik penyewaan komputer di daerah selatan Pandeglang juga kebingungan karena tidak bisa mengetik laporan kelulusan siswa sekolah dasar (SD).

Bahkan, beberapa orang guru terpaksa pergi ke Kota Serang, hanya untuk membuat laporan kelulusan. "Saya sampai berangkat ke Serang hanya untuk membuat laporan kelulusan. Kalau dihitung jaraknya sampai 80 kilometer lebih," kata Ahyan Suryadi, guru SDN Kadupandak, Kecamatan Picung.

Untuk memperkecil dampak pemadaman, saat ini PLN tengah membuat menara darurat. Dibutuhkan waktu paling cepat 24 jam atau paling lambat tiga hari untuk menyelesaikan menara darurat. Adapun untuk perbaikan menara membutuhkan waktu lebih kurang tujuh hari. "Jadi, paling cepat listrik bisa menyala Minggu malam," kata Agus.

Sementara itu, robohnya menara SUTT yang menyalurkan daya hingga aliran listrik 29 megawatt tengah diselidiki pihak Kepolisian Resor (Polres) Pandeglang.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang Ajun Komisaris Yusuf Rahmanto menduga, menara roboh lantaran besi penyangga dicuri orang.

"Indikasinya mengarah ke pencurian. Kami sudah melihat ke lokasi dan memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk warga. Siapa pencurinya, masih kami selidiki," ujarnya. (NTA)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 15		
TAHUN 2008		

Harga Batu Bara dan Gas Dipatok

Harga terendah untuk pasar ekspor menjadi harga tertinggi pasar domestik.

JAKARTA — Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan pengaturan harga jual batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan pengaturan ini, diharapkan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN lebih terjaga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menuturkan untuk menjamin ketersediaan pasokan batu bara di dalam negeri, pemerintah tidak hanya akan mengatur soal kewajiban perusahaan tambang batu bara untuk memprioritaskan memasok kebutuhan dalam negeri atau *domestic market obligation* (DMO). "Kita juga akan mengatur mekanisme harga batu bara untuk pasar domestik," ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu.

Pengaturan harga batu bara untuk pasar domestik, jelas dia, mengacu pada harga terendah untuk pasar ekspor. Harga ekspor batu bara yang terendah akan menjadi patokan harga jual tertinggi batu bara untuk pasar dalam negeri.

Kebijakan serupa, tambah Purnomo, juga akan diterapkan untuk harga jual gas bumi bagi pasar domestik. "Jadi harga maksimal domestik adalah harga terendah ekspor. Sekarang sedang disiapkan aturannya," paparnya.

Untuk menjamin ketersediaan pasokan batu bara nasional, Menteri ESDM meminta para konsumen di dalam negeri, menjelang akhir tahun untuk menyampaikan rencana penggunaan batu bara mereka untuk tahun berikutnya. "Dari data tersebut baru kita akan cocokan dengan jumlah batu bara yang bisa diproduksi oleh para pemegang PKP2B," ujarnya.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara dan Mineral Departemen ESDM MS Marpaung mengatakan, selama ini mekanisme harga jual batu bara ke PLN masih berpatokan pada fluktuasi harga di pasar internasio-

nal. Kondisi tersebut, ungkap dia, berdampak terhadap jaminan suplai batu bara ke pembangkit PLN.

"Misalnya dalam rapat direksi ditetapkan harganya 90 dolar AS per ton. Tapi nanti begitu ditetapkan, begitu mau transaksi seminggu kemudian harganya berubah naik. Karena itu akan kita buat patokan harga."

Menurutnya, patokan harga tersebut hanya berlaku untuk kebutuhan batu bara bagi pembangkit listrik PLN. Pengaturan harga ini, sambung dia, nantinya akan berbeda-beda tergantung spesifikasinya seperti tingkat kalori dan kadar sulfur.

Sementara, industri yang juga memakai batu bara menggunakan harga komersial. "Sebab, PLN adalah utilitas publik. Tapi, industri selain PLN yang memakai batu bara hanya sedikit," katanya.

Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara mengatakan, pihaknya tidak keberatan kalau harga batu bara mengikuti harga pasar. Tapi, mesti disesuaikan dengan kebutuhan domestik. "Kami sepakat kalau harga ekspor terendah, menjadi patokan tertinggi PLN," katanya.

PLN tinjau ulang

Sementara itu, PT PLN (Persero) akan meninjau ulang seluruh skema pendanaan pengadaan bahan bakar untuk pembangkit listrik milik swasta (Independent Power Producer/IPP). Kebijakan ini menyusul persoalan pasokan batu bara ke PLTU Cilacap yang terjadi beberapa waktu lalu.

Rudiantara menuturkan, untuk menghindari terulangnya masa pasokan batu bara yang terjadi di PLTU Cilacap, pihaknya akan memprioritaskan kemampuan keuangan. Selama ini, diakuinya, masalah pendanaan masih menjadi kendala utama bagi pihak swasta dalam penyediaan suplai listrik di dalam negeri.

"Kita akan *review* semua, dan pastikan IPP adalah *financial game*. Artinya, PLN akan mendahulukan kepentingan suplai ke masyarakat dengan mendahulukan kemampuan keuangan IPP," paparnya. ■ dia

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

PON

Purnomo: PLN Wajib Amankan Pasokan Listrik

JAKARTA (Suara Karya): Meski Panitia Besar PB Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Kaltim 2008 telah menjamin pasokan listrik aman selama penyelenggaraan *event* tersebut, namun kekhawatiran tetap saja mengemuka. Tak kurang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro ikut mewanti-wanti panitia penyelenggaraan PON supaya gangguan tersebut tidak terjadi. Purnomo secara tegas meminta PLN tetap bersiaga penuh menjaga segala kemungkinan yang bisa terjadi selama *event* tersebut berlangsung, 6-18 Juli mendatang.

"Masalah listrik sedang menjadi isu karena sering terjadi pemadaman. Dalam rapat tadi saya sudah menyampaikan kepada PLN, untuk memastikan bahwa pasokan listrik pada acara PON di Kaltim aman," kata Purnomo usai rapat koordinasi kelistrikan dengan PLN akhir pekan lalu.

Pasokan listrik ke wilayah Kalimantan memang menjadi kendala tersendiri dalam pergelaran PON kali ini. Ini tak lain karena dalam kehidupan sehari-hari mereka pun, warga di sana kerap mengalami pemadaman listrik bergiliran.

Tentunya bukan hal yang baik jika pesta olahraga nasional ini harus tersendat akibat padamnya listrik. Hal tersebut pastinya bakal mengganggu kelancaran *event* yang akan berlangsung selama 12 hari tersebut.

"Jangan sampai pada saat *event* olahraga besar seperti itu listrik padam," ujar Purnomo menegaskan.

Purnomo yang juga Ketua Umum PB PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia) ini pantas khawatir karena saat ini saja ketika *event* itu belum berlangsung, pemadaman bergiliran di kota-kota Kalimantan Timur kerap terjadi karena minimnya pasokan. Kondisi tersebut ada kemungkinan bakal terulang karena kebutuhan daya listrik selama *event* digelar mengalami kenaikan drastis.

Sementara itu, Ketua Harian PB PON Syaiful Teteng mengatakan, seluruh tempat pertandingan (*venues*) sudah siap digunakan. "Kami sudah melihat seluruh *venue* di Kaltim untuk PON, semuanya sudah siap digunakan," kata Syaiful Teteng di Balikpapan.

Teteng menegaskan, *venue* itu sudah dapat digunakan, namun untuk fasilitas di luar *venue* pada beberapa tempat masih dalam penyelesaian, seperti lanskap di beberapa *venue*.

"Namun, hal ini tidak memengaruhi untuk melakukan pertandingan pada saat PON dilaksanakan," ujar Teteng.

Mengenai penyelesaian terakhir seluruh *venue* di Kaltim, ia optimistis pada awal Juli sudah tuntas semua.

PON XVII 2008 di Kaltim akan berlangsung 5-17 Juli, dengan mempertandingkan 43 cabang olahraga (*cabor*) di *venue* yang tersebar di enam kabupaten/kota di Kaltim, yaitu Samarinda, Balikpapan, Berau, Tarakan, Bontang, dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Hanya saja, Teteng mengaku masih mengkhawatirkan mengenai makanan untuk para atlet. "Memang hingga kini belum ada atlet yang mengeluhkan masalah makanan, namun mulai Senin kami akan melakukan pengecekan,"

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA
<input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY
<input type="checkbox"/> KOMPAS
<input type="checkbox"/> KORAN TEMPO
<input type="checkbox"/> KORAN KONTAN
<input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/> NERACA
<input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT
<input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA
<input type="checkbox"/> REPUBLIKA | <input type="checkbox"/> SUARA KARYA
<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA
<input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN
<input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN
<input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN
<input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST
<input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA
<input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO
<input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST
<input type="checkbox"/> |
|---|---|

KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI GEOLOGI
 MIGAS UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 6 TAHUN 2008



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2008

Biarpet di Sumatra Diperpanjang

PADANG (MI): Defisit pasokan listrik yang terjadi di wilayah Sumatra Bagian Tengah dan Sumatra Bagian Selatan diperkirakan hingga September mendatang. Sebelumnya perkiraan berlangsung hingga Juli.

Manajer Operasi Sistem Penyaluran dan Pusat Pembangkit Beban (P3B) PT PLN Wilayah Sumatra Sudibyo mengatakan, krisis listrik itu disebabkan perbaikan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin. Selain itu, juga disebabkan rencana pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Singkarak pada Juli hingga September mendatang.

"Beberapa komponen pembangkit dan *controller system* pada PLTU Ombilin masih memerlukan perbaikan lanjutan," katanya di Padang, Sumatra Barat (Sumbar), kemarin.

Sebelumnya pemeliharaan PLTU Ombilin telah selesai. Namun, saat PLTU itu kembali masuk ke sistem interkoneksi Sumatra Bagian Tengah (Sumbagteng) dan Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel), terdapat kelebihan vibrasi (getaran) sehingga pembangkit itu kembali dikeluarkan dari sistem interkoneksi. Jika dipaksakan beroperasi, akan berdampak pada kerusakan seluruh pembangkit.

Akibatnya, sistem interkoneksi Sumbagteng dan Sumbagsel defisit pasokan mencapai 168,2 megawatt (Mw) pada saat beban puncak (pukul 17.00 hingga 22.00 WIB). Hal itu menyebabkan pemadaman bergilir.

Pemadaman bergilir di wilayah Sumbagteng meliputi Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Sedangkan Sumbagsel meliputi Sumatra Selatan, Bangka Beli-

tung, Bengkulu, dan Lampung. Kebutuhan listrik di Sumbagteng dan Sumbagsel saat ini rata-rata mencapai 1.586,2 Mw, sedangkan pasokan yang tersedia pada saat beban puncak hanya 1.418 Mw. "Perbaikan PLTU Ombilin diharapkan selesai pada minggu pertama Juli mendatang."

Meski PLTU dengan kapasitas terpasang 200 Mw itu kembali beroperasi pada minggu pertama Juli mendatang, wilayah interkoneksi Sumbagteng dan Sumbagsel belum terbebas dari defisit listrik. Sebab, pada saat yang sama PLTA Singkarak memulai tahap pemeliharaan. PLTA dengan kapasitas 172 Mw itu menjalani tahap pemeliharaan mulai 1 Juli hingga 29 September 2008.

Dengan keluarnya PLTA Singkarak dari sistem interkoneksi, defisit pasokan listrik bertambah. Jika saat ini rata-rata defisit listrik pada saat beban puncak mencapai 168,2 Mw, dengan tidak beroperasinya PLTA Singkarak kekurangan listrik diperkirakan mencapai 260 Mw. "Mudah-mudahan, seluruh proses perbaikan tersebut cepat selesai sehingga saat bulan Ramadan nanti tidak akan terjadi lagi pemadaman listrik bergilir," kata Sudibyo.

Sementara itu dari Banjarnegara, Jawa Tengah, dilaporkan PLTA Mrica hanya mampu mengoperasikan tiga unit turbin, masing-masing dengan kemampuan 60 Mw selama beban puncak.

(AA/NJ/LD/RF/DY/N-1)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

Kompensasi "Byar-Pet"

Krisis pasokan listrik, bukan hal istimewa di Tanah Air. Beberapa tahun terakhir ini, masyarakat tidak bisa menikmati layanan prima dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pemadaman bergilir acapkali terjadi, akibat ketidakmampuan PLN menyuplai daya sesuai kebutuhan yang terus bertambah.

Dua alasan klasik selalu disorongkan PLN. *Pertama*, minimnya pembangunan pembangkit baru, akibat tiadanya dana investasi. Akibatnya, kesenjangan antara suplai dan kebutuhan listrik selalu terjadi.

Kedua, terlambatnya pasokan sumber energi untuk menggerakkan turbin-turbin di pembangkit PLN. Hal ini ada beberapa faktor, seperti faktor alam yang menyebabkan terhambatnya kapal-kapal pengangkut minyak atau batu bara, dan faktor minimnya dana pengadaan sumber energi tersebut.

Terhadap dua faktor yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen PLN tersebut, masyarakat dipaksa untuk maklum. Tiadanya alternatif penyuplai daya listrik di negeri ini, membuat konsumen tak punya pilihan lain, kecuali pasrah dan menerima ketidaknyamanan.

Hidup tanpa pijar lampu listrik dan perabot elektronika, adalah ironi kehidupan di tengah kemajuan teknologi dan peradaban saat ini. Pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, berdampak negatif bagi perekonomian. Aktivitas bisnis dan produksi terganggu. Kerugian pun membayang di depan mata.

Inilah biaya yang harus kita pikul bersama, buah dari ketidaksihgan PLN mengantisipasi segala keterbatasan. Pemadaman bergilir yang bakal terjadi hingga 2010, adalah cermin salah kelola di manajemen PLN, yang masih belum terbenahi secara menyeluruh dan tuntas.

Orientasi untuk memberi pelayanan yang prima kepada konsumen, belum menjadi roh. Justru sebaliknya, institusi jasa publik di negeri ini terlalu gampang mengalihkan beban persoalan ke pundak masyarakat.

Meskipun gagal memenuhi kewajibannya, PLN *toh* tetap berada di atas angin. Meskipun dimungkinkan publik menuntut kompensasi atas segala kerugian yang ditimbulkan, namun mekanisme yang ada dibuat sedemikian rupa sehingga PLN terbebas dari kewajiban tersebut.

Aturan yang ada menyebutkan, kompensasi berupa pengurangan tagihan, baru diberikan bila pemadaman berlangsung tiga kali 24 jam berturut-turut dalam periode sebulan. Aturan ini jelas dengan mudah disiasati PLN, sehingga terhindar dari kewajiban memberi kompensasi, walaupun praktiknya durasi pemadaman dalam satu bulan melebihi 72 jam.

Aturan tersebut jelas tidak memihak konsumen. Aturan semacam ini justru menjadi disinsentif bagi PLN untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen. Dengan kata lain, pemerintah turut mendorong manajemen PLN untuk bersikap tidak profesional memenuhi tanggung jawabnya.

Untuk itu, kita mendorong pemerintah untuk membuka ruang bagi masyarakat agar menerima kompensasi atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang kurang prima oleh PLN dan instansi manapun. Pemerintah di "republik byar-pet" ini harus mereformulasi segala aturan, agar antara konsumen dan penyedia jasa, berada dalam posisi yang setara, sehingga kepentingan konsumen (masyarakat) yang selama ini dipaksa untuk taat membayar pajak, terlindungi.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA
 MIGAS DAN PANAS BUMI GEOLOGI
 ENERGI ALTERNATIF UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2008

PLN Siap Beri Kompensasi

[JAKARTA] PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menegaskan siap memberi kompensasi ke masyarakat terkait pemadaman bergilir yang terjadi akhir-akhir ini. Namun, mengacu pada aturan yang ada, syarat pembayaran kompensasi masih menguntungkan PLN, karena harus memenuhi syarat pemadaman listrik selama tiga kali 24 jam secara berturut-turut.

"Sejauh ini belum. Tapi, PLN siap memberikan kompensasi jika memang kondisinya seperti itu," tegas Sekretaris Perusahaan PT PLN, Supriyanto, di Jakarta, Jumat (27/6).

Sementara itu, mengenai solusi jangka pendek, Supriyanto justru meminta partisipasi pelanggan untuk mengurangi pemakaian listrik.

Namun, ekonom Iman Sugema menyangsikan efektivitas ajakan penghematan listrik itu. Sebab, di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang belum mapan perekonomiannya dan tengah bersemangat mengejar pertumbuhan ekonomi, sulit mengharapkan tercapainya penghematan energi.

Aturan Lama

Secara terpisah, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan, aturan yang menyatakan bahwa kompensasi baru diberikan jika terjadi gangguan selama 3x24 jam berturut-

turut merupakan aturan lama.

"Berdasarkan Keppres 89/2002 dan Keputusan Dirjen Listrik 114/2002 kompensasi kepada masyarakat terhadap gangguan listrik diatur oleh masing-masing daerah berdasarkan jumlah gangguan, lama pemadaman, dan kesalahan pencatatan meter," ungkapnya, Sabtu (28/6).

Hal senada ditegaskan Koordinator Advokasi dan Penegakan Hukum, LBH Jakarta, Hermawanto. Menurutnya, Dasar hukum gugatan ke pemerintah Pasal 18 pada UU 8/1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Selain itu, juga Pasal 1365 KUHAP.

Akibat Sedimentasi

Sementara itu, akibat sedimentasi Waduk Mrica, PLTA Sudirman di Banjarnegara, Jawa Tengah, terancam tidak mampu memasok kebutuhan listrik di Jateng. Debit air Waduk Mrica menurun drastis dengan elevasi 150 meter. Padahal agar dapat memproduksi listrik sebesar 180 MW, dibutuhkan elevasi 200 meter.

Peneliti Pusat Studi Bencana Alam UGM Yogyakarta, Sudibyakto menjelaskan, sedimentasi

Waduk Mrica sudah mencapai separuh volume waduk, hingga 74 juta meter kubik, dari daya tampung 140 juta meter kubik.

Di Sumbar, meskipun PLTU Ombilin telah selesai diperbaiki, tetapi ketersediaan batu bara masih menjadi kendala. Bahkan mulai 1 Juli hingga 29 September, PLTA Singkarak akan memasuki masa pemeliharaan, sehingga akan dilakukan pemadaman total pembangkit tersebut. [H-13/DLS/E-8/BO/152]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN FEB MAR APR MEI <u>JUN</u> JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 <u>28</u> 29 30 31	
HALAMAN : 8	
TAHUN 2008	

API Jabar Setujui Pemadaman Terjadwal

[BANDUNG] Sedikitnya 248 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat (Jabar) sepakat untuk menghemat listrik. Perusahaan yang terlibat sangat besar dan menggunakan lebih dari 500 megawatt (MW).

Demikian dikatakan Ketua API Jabar, Ade Sudrajat, usai menandatangani nota kesepakatan tentang pengurangan energi listrik di kantor PT PLN Distribusi Jabar-Banten, Bandung, baru-baru ini.

Dalam nota kesepatan tersebut para pengusaha menyatakan persetujuannya untuk menghemat penggunaan listrik hingga 100 MW setiap harinya. Perusahaan-perusahaan ini tersebar di Kota dan Kabu-

paten Bandung, Cimahi, Purwakarta, serta Cirebon. Mereka membuat kelompok kerja yang akan mengkoordinasikan penyusunan jadwal pengurangan pemakaian listrik bagi setiap perusahaan.

"Jadwalnya sedang disusun oleh perusahaan peserta dengan unit Pelayanan Jaringan PLN.

PLN menjatah setiap area menghemat sampai 4,77 persen dari jatah listrik tiap wilayah," katanya.

Perusahaan yang ikut program itu secara bergantian akan mengurangi pemakaian listriknya dalam tujuh jam sebanyak 50 persen. Tiap perusahaan mendapat giliran lima hari sekali. Meski demikian, Ade memaparkan masih

ada sekitar 3.000 perusahaan yang belum bersedia bergabung. Konsekuensi dari mereka yang tidak ikut menghemat ini harus bersiap-siap menghadapi pemadaman bergilir.

"Dengan adanya penjadwalan ini, industri tidak akan dirugikan karena mereka sudah siap jika terjadi pemadaman bergilir. Dan, kami juga bisa menghitung dengan terinci jumlah kerugian yang dialami pengusaha," tuturnya.

General Manager PT PLN Distribusi Jabar-Banten, A Budiman Bachrulhayat mengatakan, apabila penghematan ini berjalan efektif maka pada akhir tahun pemadaman bergilir bisa dihindari. [153]

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2008

Sekali Padam Rugi Rp 700 Juta

[JAKARTA] Pemadaman listrik mengakibatkan kerugian cukup besar bagi industri tekstil. Kerugian satu perusahaan tekstil berkisar Rp 300 juta-Rp 700 juta untuk satu kali pemadaman selama 7-8 jam.

"Lucunya, PLN meminta kami mengurangi produksi hingga 50 persen sekali dalam seminggu, atau pemadaman selama 7-8 jam per minggu. Ini bukan jalan keluar," ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismi, di Jakarta, Jumat (27/6).

Berdasarkan data API, industri tekstil dan produk tekstil di Jabar yang terkena pe-

madaman mendadak, meliputi 36 perusahaan di Cimahi, 30 di Bandung, dan 12 di Padalarang. Di Jateng, ada 19 perusahaan di Pekalongan dan sekitarnya, 22 di Semarang, Bawen, dan Ungaran, serta 55 di Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Sragen, dan Solo.

Kerugian proses produksi, kata Ernovian, setara dengan kehilangan kapasitas produksi sekitar 1.200 ton benang, 1,3 juta yard (118.300 km) kain, dan sekitar 600.000 pakaian jadi.

Sementara itu, Ketua API Jawa Barat Ade Sudrajat menuturkan, API sepakat dengan PLN untuk melakukan pema-

daman berkala, yaitu selama satu hari dalam satu bulan, atau 24 jam, atau tiga kali dalam satu bulan selama 7 jam.

Namun, Ketua API Jawa Tengah Agung Wahono mengungkapkan, PLN tidak konsisten dengan jadwal pemadaman. "Pemadaman terjadi di luar jadwal itu," ujarnya.

Menyikapi krisis listrik, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi kembali menegaskan, hal itu tidak lepas dari persoalan di internal manajemen PLN. "Hal ini jangan serta merta dibebankan kepada industri," kata Sofjan. [CNV/A-17]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

PLN Beri Kompensasi

Pengurangan Tagihan Bersyarat kepada Seluruh Pelanggan

JAKARTA (SINDO)—PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan kepada seluruh pelanggan, termasuk industri.

Kompensasi ini menyusul krisis listrik yang terus terjadi. Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar mengatakan, kompensasi akan diberikan jika pemadaman terjadi dengan frekuensi tiga kali dalam satu hari, maksimal lima jam, dan terjadi selama tiga hari berturut-turut.

"Pemberian kompensasi itu tidak langsung diberikan, tapi ada ketentuannya," ujarnya di Jakarta kemarin.

Fahmi menambahkan, dalam memberikan kompensasi tersebut, perseroan menggunakan pertimbangan setiap daerah masing-masing memiliki unit tingkat mutu pelayanan berbeda-beda.

Menurut dia, ketentuan pemotongan tagihan tertuang pada tabel pedoman volume dan frekuensi pemadaman terjadi. Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menuturkan, dengan kondisi harga minyak dunia yang tinggi saat ini membuat kalangan industri yang awalnya membangun pembangkit sendiri sekarang menjadi pelanggan industri.

Kondisi seperti ini, lanjut dia, yang turut memberikan kontribusi defisit listrik, terutama di Jawa Bali. "Akibatnya, beban meningkat dan terjadi defisit," tuturnya.

Untuk mengantisipasi keadaan ini, kata dia, PLN dan pemerintah telah membuat langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka panjang, akan dilakukan audit energi mulai 1 Juli mendatang di gedung pemerintah di Jakarta. Dengan begitu, diharapkan konsumsi di Ibu Kota negara ini dapat me-

nurun hingga 30%, kemudian kalangan industri diminta melakukan penghematan.

Di samping itu, jelas Purnomo, untuk jangka panjang pemerintah akan melakukan jaminan suplai batu bara di dalam negeri, pengoptimalan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) sebagai bahan bakar pembangkit agar tidak lagi bergantung kepada bahan bakar fosil, serta pemeliharaan pembangkit PLN yang sudah tua dipercepat dan mengatasi kendala pembangunan pembangkit listrik swasta (IPP) seperti pendanaan.

Lebih jauh Fahmi memaparkan, hingga Mei, pertumbuhan konsumsi listrik mencapai 6,8%. Dengan angka ini, papar dia, PLN harus lebih bekerja keras, meski perusahaan listrik pelat merah ini akan berusaha menggunakan BBM dan anggaran sesuai yang dianggarkan pemerintah. "Saya pernah katakan, sekalipun kita tidak punya keterbatasan daya ya tetap harus dilakukan peng-

hematan supaya subsidi yang diberikan tidak meningkat," ungkap Fahmi.

Seperti diketahui, dalam satu tahun terakhir, sistem kelistrikan di wilayah Jawa-Bali sering mengalami pemadaman. Karena permasalahan ini, PLN persero bahkan menekan pertumbuhan listrik menjadi 1,4% dari angka pertumbuhan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008 sebesar 1,9%.

Akibatnya, pelayanan listrik yang diberikan tidak maksimal. Tahun lalu, pertumbuhan listrik 6,7%.

Kondisi ini terjadi akibat pembatasan PLN untuk mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM). Dalam alokasi tersebut, kata dia, perusahaan listrik pelat merah tersebut hanya diizinkan menggunakan BBM sebesar 9,1 juta kiloliter (kl). Dengan demikian, pelayanan terhadap konsumen baru seperti kalangan usaha, rumah tangga, dan wirausaha terganggu.

Sepanjang Januari hingga Mei 2008, konsumsi lebih tinggi dari angka yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008. Pemakaian listrik pada waktu beban puncak diperkirakan naik terus. Pada tahun ini, PLN memperkirakan beban puncak mencapai 17 ribu MW. Sedangkan rata-rata realisasi pemakaian listrik pada waktu beban puncak sepanjang Januari hingga Mei 2008 sebesar 16.055 MW atau naik 5,74 % dari realisasi pemakaian tahun lalu.

Dalam periode yang sama 2007, rata-rata realisasi pemakaian listrik pada waktu beban puncak hanya 15.183,4 MW. Menurut data yang disajikan PLN, tren kenaikan beban puncak pada sistem Jawa-Bali mulai terlihat pada Maret 2008. Realisasi pemakaian listrik pada beban puncak pada Maret sebesar 15.791 MW, kemudian naik menjadi 16.184 MW pada April, dan 16.300 MW pada Mei.

(ferial thalib)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Utang PLN Dibayar APBN

JAKARTA – PT PLN berjanji melunasi utang kepada PT Pertamina sebesar Rp 12,9 triliun. Sebanyak Rp 7,9 triliun akan dibayarkan pemerintah melalui APBN, sedangkan sisanya Rp 5 triliun melalui surat utang. Wadirut PLN Rudiantara di Jakarta, Sabtu (28/6), mengatakan, sebagian dari utang ke Pertamina telah dibayarkan pada pekan lalu, sisanya pada Januari 2009. Sisanya sebanyak Rp 5 triliun dicicil dengan cara mengangsur Rp 500 miliar setiap enam bulan selama lima tahun. Sebelumnya diberitakan, Pertamina merestrukturisasi utang PLN sebesar Rp 12,9 triliun menjadi dua bagian, yaitu penundaan pembayaran sebesar Rp 7,9 triliun dari sisa subsidi PLN yang belum dibayarkan karena menunggu audit BPK. Kedua, beban utang PLN sebesar Rp 5 triliun, direstrukturisasi dalam bentuk surat utang bertenot lima tahun dan memiliki bunga SBI plus 250 *basic point* yang diangsur Rp 500 miliar setiap semester. (pya)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T.4

TAHUN 2008

PLN bikin pembangkit listrik sampah

BANDUNG: Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung segera dibangun setelah DPRD Kabupaten Bandung menyetujui kerja sama dengan PLN.

PLTSa Babakan akan dibangun di lahan tempat pembuangan akhir sampah Babakan dengan luas bangunan pabrik mencapai 0,5 hektare, dengan kapasitas produksi 800 KW, yang separuhnya akan disalurkan kepada warga Kabupaten Bandung.

Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Mohamad Ikhsan, kemarin, mengemukakan DPRD tinggal membuat nota komisi untuk menyetujui pembangunan pembangkit listrik, dengan dasar perjanjian hibah dari 3 tahun sampai 5 tahun, dengan tahap awal operasi oleh PLN. (BISNIS/k45)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7.4

TAHUN 2008

Pengembang listrik swasta akan dijamin pemerintah

Oleh RUDI ARIFFIANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah mengkaji keluarnya jaminan terhadap pengembang listrik swasta (*independent power producer/IPP*) untuk memacu perkembangan pembangunan listrik oleh swasta yang hingga kini dinilai lamban.

Di sisi lain, pemerintah akan memperketat regulasi IPP, terutama swasta yang terbukti tidak mampu menjalankan kontrak dengan PLN, sehingga jaminan ketersediaan listrik sejalan dengan rencana umum pembangunan tenaga listrik nasional.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan berdasarkan hasil evaluasi antara pemerintah dan PLN banyak IPP yang mengalami kemunduran jadwal dari yang seharusnya sesuai dengan kontrak.

Hal itu, katanya, terjadi karena keterlambatan di saat *financial closing*, di mana pengembang biasanya dihadapkan pada kesulitan menyerahkan *collateral* untuk pinjamannya kepada perbankan. "Mereka terlambat pada saat *financial closing* sehingga pembangunan terlambat dan selesainya terlambat dan mengganggu perencanaan yang sudah ditetapkan," katanya akhir pekan lalu.

Dia mengatakan telah meminta Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi bersama PLN untuk menyiapkan regulasi dan rekomendasi yang akan menjadi jalan keluar masalah *financial closing* dari IPP itu. Menurut Purnomo, IPP di masa lalu relatif bisa berjalan karena adanya dukungan jaminan dari pemerintah.

"Diharapkan dalam waktu dekat sudah ada rekomendasi dari bawah apa yang harus dilakukan. Apa karena tidak bonafide, apa karena butuh *support letter*, atau mungkin *banking system* dalam negeri juga perlu membantu ini yang sedang dicermati," jelasnya.

"Dari segi makro, belajar dari pengalaman pada masa lalu, IPP bisa jalan karena ada *support letter* dari pemerintah. 10.000 MW juga ada itu. IPP yang ke depan, kami mungkin akan memberikan *support letter* atau *guarantee letter*."

Di sisi lain, Purnomo juga menjelaskan pemerintah juga sedang mengevaluasi mengenai kebijakan apa yang akan dikenakan kepada IPP

yang mundur. "Apa diberi penalti atau putus [kontrak], dan lain-lain."

Namun, dia tidak menjelaskan kemungkinan adanya kebijakan pemerintah untuk mengontrol kinerja IPP dalam mengelola pembangkit yang sudah *on stream*. Menurut dia, hubungan pemerintah dengan IPP hanya sebatas pembelian listrik dan menyerahkan persoalan operasional pada internal PLN dan IPP.

"Apa yang terjadi di dalam korporat, aturan mengenai hal itu adalah internal yang waktu PLN tender."

Dirut PLN Fahmi Mochtar mengatakan dalam kontrak ada klausa yang mengatur apabila terjadi ketidakmampuan mereka untuk memasok. Ada *capacity factor*, di mana IPP harus mengirimkan minimum sekian persen dari yang diperjanjikan.

"Kalau dia tidak memenuhi persyaratan itu, akan kena penalti," jelasnya.

Wadirut PLN Rudiantara mengatakan pihaknya akan meminta perubahan IPP menjadi *financial game*, di mana PLN harus mendahulukan kemampuan keuangan dari mitranya. "Kami akan *review* betul semua bisnis modelnya. Bayangkan dari 150 IPP, yang beroperasi 15, *under contraction* sembilan, 15-20 tahap *financial closing* yang sudah lama dan 100-an yang belum *perform*," paparnya.

PLTU Cilacap

Terkait dengan PLTU Cilacap 2x300 MW yang dikelola oleh IPP, PT Segara Sumber Prima, Fahmi Mochtar mengatakan hari ini kapal pengangkut batu bara berkapasitas 12.000 ton akan berlabuh di Cilacap. Dengan itu, diharapkan PLTU tersebut sudah mulai beroperasi secara bertahap.

Untuk keandalan listrik di sistem Jawa-Bali, Fahmi menjelaskan trafo PLTU Suralaya Unit 5 berkapasitas 600 MW yang sudah setahun tidak beroperasi akan masuk sistem pada Agustus. Selain itu, stok bahan bakar di setiap pembangkit yang beroperasi penuh saat ini dalam kondisi cukup. "Tidak bisa dianggap akan menjamin ke-listrikan tidak akan padam karena pemeliharaan terus harus dilakukan," katanya.

Fahmi mengatakan akan bernegosiasi dengan kalangan industri, konsumen besar listrik, untuk penjadwalan libur produksi. Dia berharap industri tidak melakukan libur produksi pada Sabtu-Minggu. (rudi.ariffianto@bisnis.co.id)

Produksi, konsumsi listrik per tahun (GWh)

Tahun	Produksi	Konsumsi
2007	143,682.02	121,521.81
2006	126,168.62	112,609.80
2005	124,449.59	107,031.26
2004	120,244.31	99,425.79
2003	113,019.68	90,439.69
2002	108,191.35	87,409.1

Sumber: Datawarehouse ESDM

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008

Aturan Baru Jamin Pasokan

Pemerintah menyiapkan aturan patokan
harga batubara untuk pembangkit PLN dan IPP

Gentur Putro Jati

JAKARTA. Pemerintah agaknya makin tergelitik. Maraknya pemadaman listrik akibat pembangkit listrik PT Perusahaan Listrik Negara kekurangan batubara belakangan ini, mendorong pemerintah serius memikirkan kebijakan menjamin pasokan batubara pembangkit listrik.

Meski belum sampai menetapkan persentase kewajiban pasok domestik atawa *domestic market obligation* (DMO), pemerintah sedang menyusun regulasi harga patokan batubara yang membuat harga ekspor terendah sesuai dengan harga tertinggi di dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengaku sudah menugasi Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi untuk mempertemukan PLN dengan semua produsen batubara yang terikat kontrak memasok batubara ke pembangkit listrik PT PLN. "Nanti kami merundingkan berapa harga ekspor terendah untuk ditetapkan sebagai harga tertinggi domestik. Sekarang sedang kami siapkan aturannya," kata Purnomo, Sabtu (28/6).

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Mangantar S. Marpaung memberi gambaran situasi jual

beli batubara untuk pembangkit. Taruh kata sebuah PLTU butuh batubara dengan spesifikasi tertentu seharga US\$ 25 per ton. Namun, perusahaan batubara bisa menjualnya ke luar negeri seharga US\$ 27 per ton. "Nah, nanti kami buat kesepakatan berapa harga yang pas," jelas Marpaung.

Berharap segera terbit

Acuan harga ini hanya berlaku bagi pembangkit PLN dan *Independent Power Producer* (IPP) alias perusahaan pembangkit listrik swasta, tidak untuk industri. "Kalau industri itu *commercial base*," kata Marpaung.

Harga tertinggi batubara di pasar lokal sama dengan harga terendah ekspor.

Selama ini, kata dia, pemerintah berada dalam posisi dilematis menyangkut urusan harga jual batubara. Di satu sisi, pemerintah ingin harga batubara tinggi untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Makin tinggi harga batubara, kian gede

pula setoran ke negara. Soalnya, selama ini penambang berstatus perjanjian karya perusahaan batubara (PKP2B) harus menyertakan 13,5% pendapatan mereka ke pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah pusing karena banyak pihak menuntut penjualan batubara ke PLN se-rendah mungkin. "Jadi lebih bagus dibuka saja, misal harga Berau Coal berapa, kami tanya

penjualan kemana. Lalu, PLN juga harus membuka berapa harga kontraknya. Kalau ada masalah harga, kita sesuaikan," kata Marpaung.

Namun, ujar Marpaung, proses penyusunan aturan itu bisa sedikit makan waktu. Pasalnya penyesuaian penetapan harga harus dilakukan untuk semua pembangkit PLN dan swasta.

Sebaliknya, Wakil Direktur

Utama PLN Rudiantara mengaku, PLN justru mengidamkan kebijakan penyesuaian harga batubara tersebut segera terbit. Selama ini, kalau PLN akan membuat kontrak pembelian batubara, tidak ada patokan harga yang jelas berapa harga ideal batubara. "Makanya kami ingin ada suatu aturan yang secara legal bisa menjadi referensi bagi kami," kata Rudiantara.